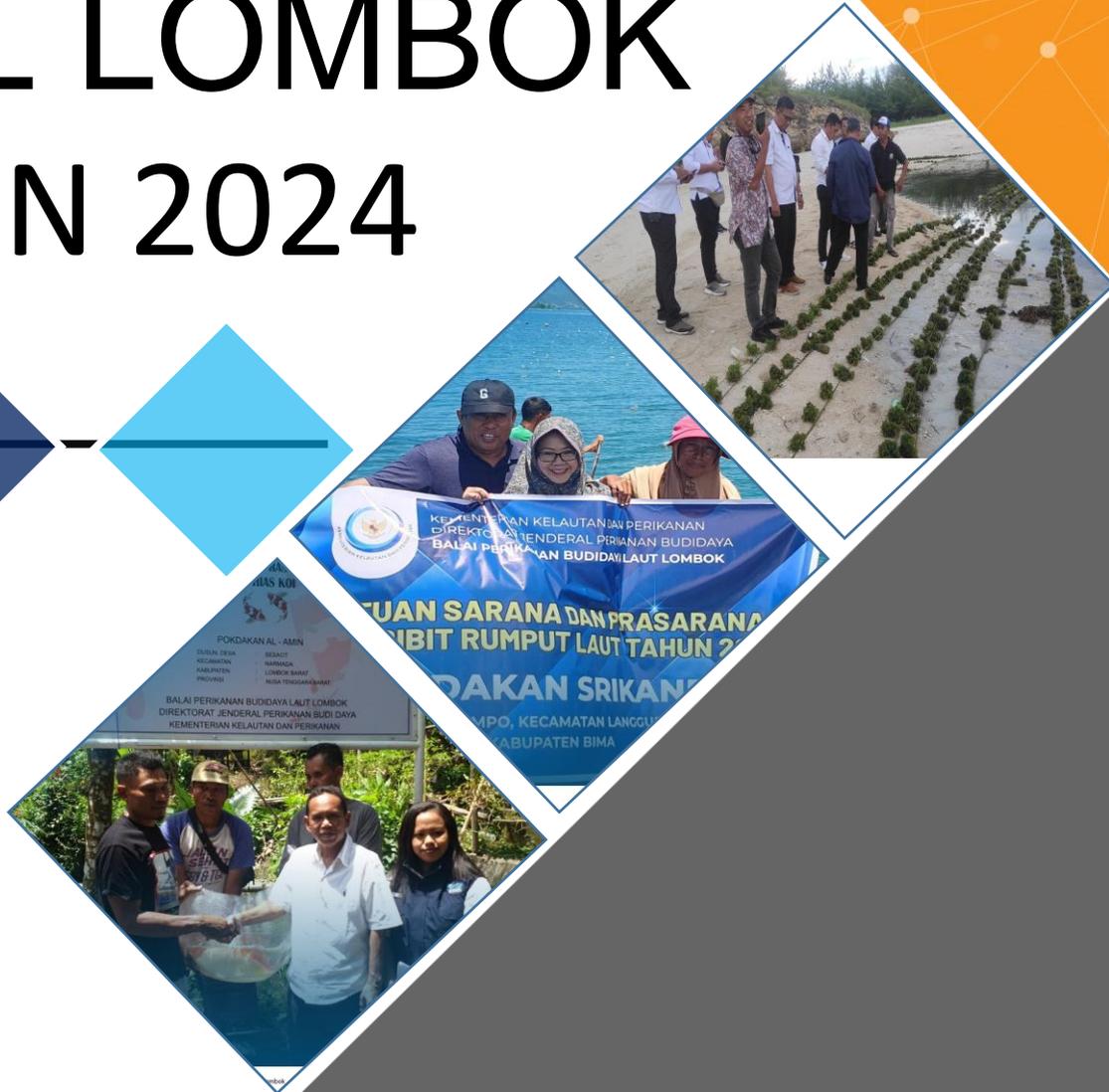
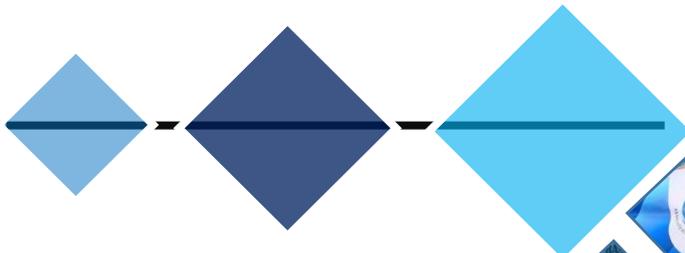




BPBL LOMBOK TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan I Tahun 2024 ini dapat disusun.

Laporan Kinerja (LKj) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan I Tahun 2024 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan I Tahun 2024 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian Perikanan Budidaya. LKj Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan I Tahun 2024 ini mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok menyesuaikan dengan DJPB KKP berikut pencapaian IKU melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024 oleh masing-masing kelompok kerja yang ada di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

LKj Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan I Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, LKj Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan I Tahun 2024 dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat.

Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan perikanan budidaya di masa mendatang.

Lombok Barat, 22 April 2024

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok



Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi.,M.P.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKTUIF	8
BAB 1. PENDAHULUAN.....	12
1.1.LATAR BELAKANG	12
1.2.MAKSUD DAN TUJUAN	12
1.3.TUGAS DAN FUNGSI.....	12
1.4.ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA	15
1.5.SISTEMATIKA LKJ.....	16
BAB 2.PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	18
2.1.RENCANA STRATEGIS BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK TAHUN 2020-2024	18
2.1.1.VISI.....	8
2.1.2.MISI.....	18
2.1.3.TUJUAN.....	18
2.1.4.SASARAN KEGIATAN	19
2.1.5.STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	20
2.2. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN.....	22
2.3.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	23
2.4.PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024	24
BAB 3.AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	26
3.2.ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	32
3.3.CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	72
3.4.EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	72
BAB 4.PENUTUP.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2024.....	24
Tabel 2. Perencanaan perolehan PNPB.....	28
Tabel 3. Nilai PNPB BPBL Lombok.....	29
Tabel 4. Perbandingan realisasi PNPB antar UPT.....	29
Tabel 5. Bantuan calon induk yang disalurkan.....	31
Tabel 6. Perkembangan penyaluran bantuan Calon Induk.....	31
Tabel 7. Perencanaan Bantuan benih yang didistribusikan ke masyarakat.....	33
Tabel 8. Bantuan benih yang didistribusikan ke masyarakat.....	33
Tabel 9. Prosentase bantuan benih yang disalurkan ke masyarakat.....	34
Tabel 10. Perkembangan penyaluran bantuan benih.....	34
Tabel 11. perbandingan antar sub unit kerja UPT Laut.....	34
Tabel 12. Target Produksi Calon Induk Unggul.....	35
Tabel 13. Capaian produksi calon induk unggul.....	36
Tabel 14. Perkembangan Calon Induk Unggul yang diproduksi.....	36
Tabel 15. perbandingan capaian calon induk unggul ikan laut yang diproduksi antar sub unit kerja UPT Laut.....	36
Tabel 16. Target Bantuan Bibit Rumput Laut.....	37
Tabel 17. Capaian bantuan bibit Rumput Laut.....	37
Tabel 18. Prosentase Bantuan Bibit Rumput Laut.....	38
Tabel 19. Perkembangan penyaluran bantuan bibit Rumput Laut.....	39
Tabel 20. Perbandingan antar UPT Laut DJPB.....	39
Tabel 21. Target Bantuan KBRL.....	40
Tabel 22. Persentase bantuan sarana KBRL yang disalurkan ke masyarakat.....	40
Tabel 23. Perkembangan penyaluran bantuan KBRL.....	41
Tabel 24. Target Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar (bioflok).....	42
Tabel 25. Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan.....	43
Tabel 26. Perkembangan penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar (bioflok).....	43
Tabel 27. Persentase diseminasi teknologi Budi Daya Ikan.....	46
Tabel 28. Perkembangan Diseminasi Teknologi Budi Daya Ikan.....	46
Tabel 29. Perbandingan prosentase Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan.....	46
Tabel 30. Target bantuan sarana dan prasarana Budi Daya Ikan hias.....	47
Tabel 31. Persentase sarana dan prasarana budi daya ikan hias yang disalurkan.....	48
Tabel 32. Perkembangan bantuan sarana dan prasarana budi daya ikan hias.....	48
Tabel 33. Target pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan.....	49
Tabel 34. Realisasi Jumlah sampel yang diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan.....	49
Tabel 35. Prosentase layanan pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan.....	51
Tabel 36. Perkembangan pengujian Sampel Kesehatan Ikan dan Lingkungan.....	51
Tabel 37. Perbandingan Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji.....	51
Tabel 38. Target Jumlah sampel AMR.....	54

Tabel 39. Realisasi Jumlah sampel AMR	54
Tabel 40. Persentase pengujian AMR	55
Tabel 41. Perkembangan pengujian sampel AMR	55
Tabel 42. Perbandingan Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji	56
Tabel 43. perkembangan IP ASN BPBL Lombok	57
Tabel 44. Perkmbangan predikat pembangunan ZI menuju WBK.....	59
Tabel 45. Perkembangan prosentase penyelesaian LHP BPK.....	59
Tabel 46. perkembangan PM SAKIP BPBL Lombok	61
Tabel 47. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	62
Tabel 48.. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT DJPB	63
Tabel 49. Perkembangan nilai IKPA BPBL Lombok	64
Tabel 50. Nilai Kinerja Anggaran BPBL Lombok	65
Tabel 51. Perkembangan Tingkat Kepatuhan PBJ	67
Tabel 52. Perkembangan Tingkat kepatuhan BMN.....	68
Tabel 53. Perkembangan pelaku usaha budidaya yang terintegrasi KUSUKA.....	69
Tabel 54. Perkembangan indeks pengelolaan kepegawaian.....	70
Tabel 55. Perkembangan nilai pengawasan kearsipan.....	71

DAFTAR GAMBAR

gambar 1. Struktur Organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Tahun 2024.....	13
Gambar 2. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan jabatan per Maret 2024	13
Gambar 3. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan tingkat pendidikan per Maret 2024.....	14
Gambar 4. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan pangkat/gol per Maret 2024	14
Gambar 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	23
Gambar 6. Screenshot aplikasi Kinerjaku.....	23
Gambar 7. Realisasi PNBP Tahun 2024	30
Gambar 10. Dokumentasi penyerahan bantuan Benih Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat.....	33
Gambar 15. Dokumentasi Penyaluran bantuan Bibit Rumput Laut	38
Gambar 18. Kegiatan Identifikasi dan verifikasi KBRL	40
Gambar 21.identifikasi dan verifikasi Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar (bioflok)43	
Gambar 24. Kegiatan Diseminasi Teknologi.....	45
Gambar 27. Dokumentasi pengambilan sampel	50
Gambar 29. Dokumentasi pengambilan sampel AMR	55
Gambar 41. Screenshot aplikasi OMSPAN	73

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKJ) ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok yang memuat rencana, capaian dan realisasi anggaran dan kegiatan BPBL Lombok pada Triwulan I Tahun 2024. Berdasarkan Surat Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (BPBL Lombok) dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2024 yang ditetapkan pada bulan Januari 2024, maka telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai oleh satker BPBL Lombok terdiri dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan dengan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Ringkasan penjelasan pencapaian IKU dalam setiap Sasaran Strategis sebagaimana berikut :

Sasaran Kegiatan 1, yaitu : “Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok ” didukung oleh 1 (satu) IKU yaitu : (i) Nilai PNBP Satuan Kerja BPBL Lombok

Sasaran Kegiatan 2, yaitu : ”Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan” didukung oleh 8 (delapan) IKU, yaitu : (i) Persentase bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat (ii) Persentase bantuan benih ikan yang disalurkan ke masyarakat (iii) Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi (iv) Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat (v) Persentase Bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang disalurkan ke masyarakat (vi) Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar yang dimanfaatkan (vii) Persentase diseminasi teknologi Budi Daya Ikan (viii) Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang disalurkan

Sasaran Kegiatan 3, yaitu : “Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang Kawasan dan Kesehatan ikan” didukung oleh 3 (tiga) IKU yaitu: (i) Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan; (ii) Ruang Lingkup Laboratorium yang terakreditasi; (iii) Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR).

Sasaran Kegiatan 4, yaitu : “Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok” didukung oleh 13 (tiga belas) IKU yaitu (i) Indeks profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BPBL Lombok; (ii) Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK; (iii) prosentase penyelesaian LHP BPK atas satker BPBL Lombok; (iv) Nilai PM SAKIP BPBL Lombok; (v) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok ; (vi) nilai IKPA lingkup satker BPBL Lombok ; (vii) NKA lingkup satker BPBL Lombok; (viii) Tingkat kepatuhan pengadaan Barang dan Jasa lingkup satker BPBL Lombok ,(ix) Tingkat kepatuhan Pengelolaan barang milik negara lingkup satker BPBL Lombok, (x) Persentase Pelaku Usaha perikanan Budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA, (xi) Indeks Pengelolaan kepegawaian, (xii) Nilai Pengawasan Kearsipan, (xiii) Persentase Layanan Perkantoran BPBL Lombok

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, dari 25 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 7 (Tujuh) Indikator kinerja yang mencapai target yang telah ditentukan pada Triwulan I Tahun 2024, yaitu :

1. Nilai PNBP BPBL Lombok sebesar Rp. 368.765.482 dari target Rp 179.590.000 ;
2. Persentase bantuan benih yang disalurkan sebanyak 21.25% dari target 0;
3. Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat sebanyak 20% dari target 0;
4. Persentase diseminasi teknologi budi daya ikan sebanyak 100% dari target 100%;
5. Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan sebesar 112,95% dari target 20%;
6. Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) sebesar 45,71% dari target 15%;
7. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebesar 100% dari target 80%; dan

Sementara terdapat 18 (Delapan belas) indikator yang belum bisa dihitung pada Triwulan I Tahun 2024, yaitu :

1. Persentase bantuan calon induk yang disalurkan;
2. Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi;

3. Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang disalurkan ke masyarakat ;
4. Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar yang dimanfaatkan;
5. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang disalurkan;
6. Ruang Lingkup Laboratorium yang terakreditasi;
7. Indeks profesionalitas ASN lingkup BPBL Lombok;
8. Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
9. prosentase penyelesaian LHP BPK satker BPBL Lombok;
10. Nilai PM SAKIP BPBL lombok;
11. nilai IKPA lingkup satker BPBL Lombok;
12. NKA lingkup satker BPBL lombok;
13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok;
14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
15. Persentase Pelaku Usaha perikanan Budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA;
16. Indeks Pengelolaan kepegawaian;
17. Nilai Pengawasan Kearsipan.
18. Persentase Layanan Perkantoran BPBL Lombok;

Berdasarkan Hasil evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2024, dapat diketahui bahwa BPBL Lombok telah mencapai target yang ditentukan pada Triwulan I, meskipun demikian BPBL Lombok akan tetap meningkatkan kinerjanya dengan memperhatikan target-target yang ditentukan pada periode mendatang untuk dapat mengoptimalkan pencapaian Indikator Kinerja Utama.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 67/MEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya mempunyai tugas yaitu melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budidaya laut, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan guna mendukung berbagai program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun rencana kerja tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Atas dasar hal-hal tersebut, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebagai salah satu UPT Ditjen Perikanan Budidaya telah melakukan penyusunan target kinerja Tahun 2023, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, dan kemudian dituangkan dalam LKj Triwulan I Tahun 2024. LKj BPBL Lombok ini menginformasikan *input*, *output*, *outcome*, dan *benefit* dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan I Tahun 2024.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan LKj BPBL Lombok Triwulan I Tahun 2024 yaitu : (i) sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi BPBL Lombok kepada seluruh *stakeholders*; (ii) sebagai sarana monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja BPBL Lombok Triwulan I Tahun 2024; dan (iii) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.3. Tugas dan Fungsi

BPBL Lombok bertugas melaksanakan uji terap teknik dan kerjasama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan serta bimbingan teknis perikanan budidaya laut, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 67/MEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya yang diuraikan lebih rinci dalam fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perikanan budidaya laut;
2. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut;
3. pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi perikanan budidaya laut;
4. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya laut;
5. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya laut;
6. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya laut;
7. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;
8. pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya laut;
9. pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya laut;
10. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut; dan
11. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, berdasarkan peraturan menteri tersebut, susunan organisasi BPBL Lombok terdiri dari :

1. Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
2. Kelompok jabatan fungsional, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional

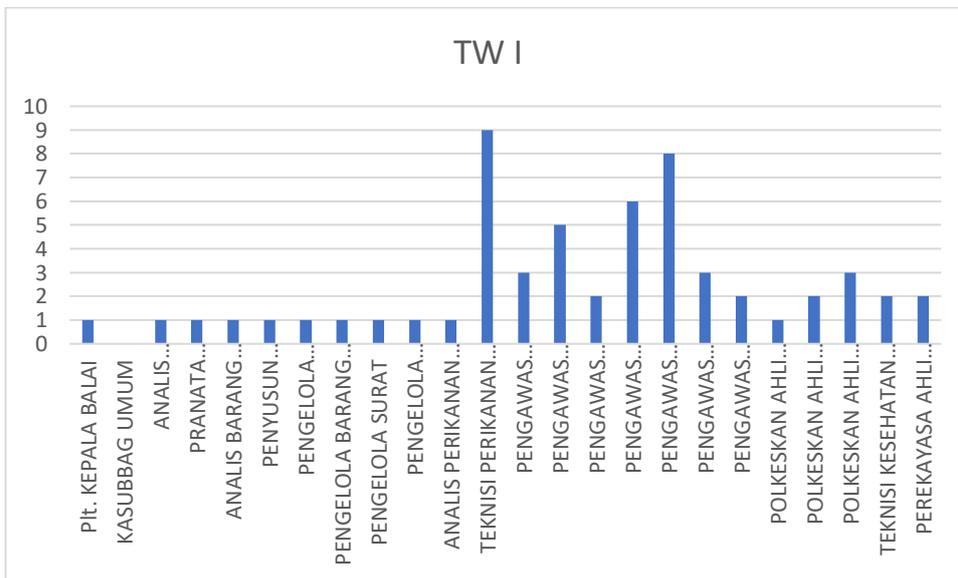
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Susunan organisasi BPBL Lombok tergambar pada susunan organisasi di bawah ini :

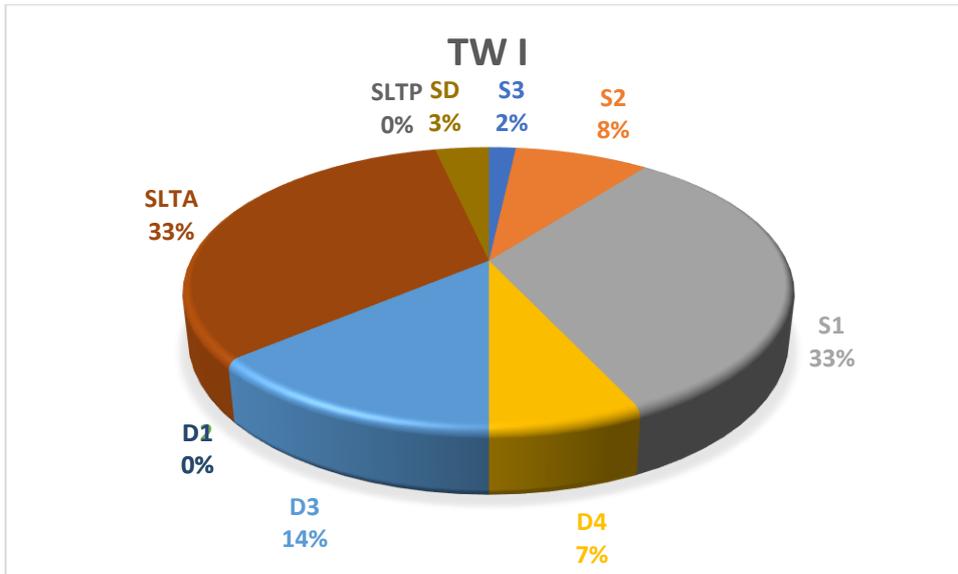


gambar 1. Struktur Organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Tahun 2024

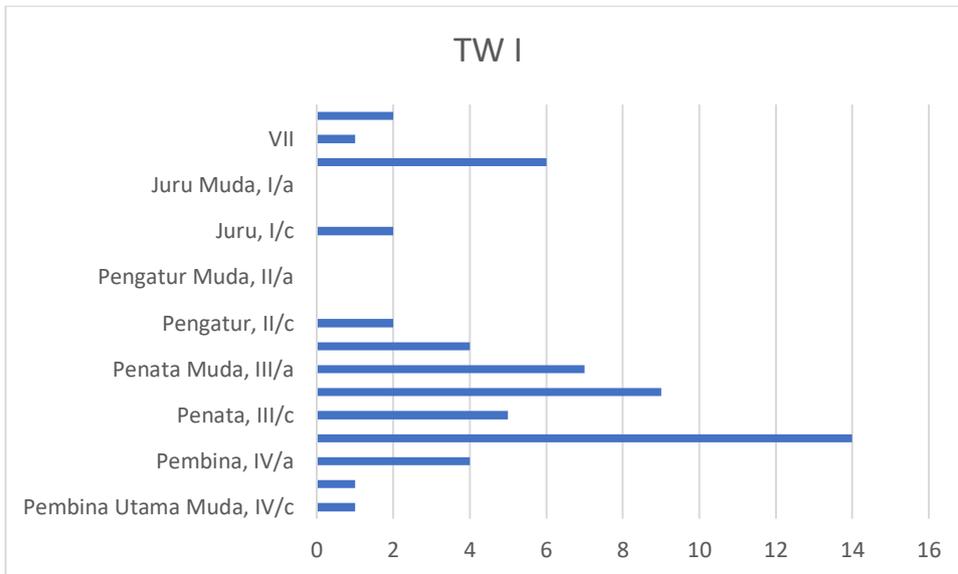
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok didukung oleh SDM sejumlah 58 orang dengan rincian sejumlah 49 orang ASN dan 9 orang PPPK dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan jabatan per Maret 2024



Gambar 3. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan tingkat pendidikan per Maret 2024



Gambar 4. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan pangkat/gol per Maret 2024

1.4. Isu Strategis (*Strategic Issued*) dan Permasalahan Utama

1.4.1. Isu Strategis Pengembangan Budidaya Laut

Budidaya laut (*Marine Culture*) di Indonesia merupakan bagian dari sektor kelautan dan perikanan yang mempunyai kontribusi penting dalam memenuhi target produksi perikanan. Potensi sumber daya perikanan budidaya laut khususnya di Propinsi NTB dimanfaatkan untuk kegiatan pengembangan komoditas-komoditas yang memiliki nilai ekonomis penting, diantaranya: rumput laut, mutiara, lobster, kerapu, kakap dan bawal bintang (Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTB). Lebih lanjut lagi data statistik perikanan budidaya di Propinsi NTB

diketahui pada tahun 2021, potensi areal budidaya laut seluas 171.010,51 hektar dengan jumlah Rumah Tangga Produksi berjumlah 10.033 unit.

Dalam pengembangan budidaya laut di wilayah tengah dan timur Indonesia (Bali, NTT, dan Papua) khususnya di propinsi NTB yang menjadi wilayah kerja BPBL Lombok terdapat beberapa isu dan permasalahan yang dihadapi, antara lain: (i) harga pakan untuk komoditas ikan laut sangatlah tinggi (pakan segar dan pakan buatan); (ii) penyakit; (iii) akses permodalan yang terbatas karna ketidak stabilan produksi dan resiko kegagalan yang tinggi; (iv) standar kompetensi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan; (v) tingkat kelulushidupan (SR) biota yang dipelihara saat panen yang masih rendah karena berbagai macam faktor mulai dari lingkungan budidaya, tidak konsistennya penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) hingga kualitas benih yang masih rendah dari segi pertumbuhan.

Selain permasalahan tersebut diatas juga terdapat beberapa tantangan yang dihadapi BPBL Lombok dalam pengembangan budidaya ikan air laut, diantaranya: (i) pengembangan teknologi budidaya dari jenis kekerangan, ikan bersirip dan juga lobster yang bernilai ekonomis tinggi belum optimal dilakukan; (ii) keterbatasan sarana prasarana, anggaran, dan SDM; dan (iii) wilayah kerja yang sangat luas.

1.4.2. Permasalahan Utama Pencapaian Indikator Kinerja Utama di BPBL Lombok

Secara umum, permasalahan-permasalahan/ kendala yang dihadapi pada Triwulan I Tahun 2024 di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, diantaranya :

1. Masih adanya deviasi hal III DIPA yang cukup tinggi sehingga perlu koordinasi yang baik antara PPK, perencana dan bagian keuangan;
2. Belum adanya pegawai dengan jabatan arsiparis di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
3. Masih kurang aktifnya informasi di media sosial BPBL Lombok

1.5. Sistematika LKj

LKj ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Balai Perikanan Budiaya Laut Triwulan I Tahun 2024 . LKj ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (*performance results*) Triwulan I Tahun 2024 dengan target dan kinerja pada tahun sebelumnya. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*Performance gap*) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja BPBL Lombok Triwulan I Tahun 2024 , permasalahan yang dihadapi, dan upaya mengatasi hal tersebut.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang BPBL Lombok serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi BPBL Lombok, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan tapja yang memuat sasaran kegiatan berikut indikator kinerja utama (IKU) pada Triwulan I Tahun 2024 .
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan rincian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBL Lombok serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang efisiensi.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama.

BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK TAHUN 2020 – 2024

2.1.1. Visi

Visi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yaitu : “Terwujudnya masyarakat perikanan budidaya yang sejahtera dan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

2.1.2. Misi

Misi yang akan dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sejalan dengan misi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yaitu :

1. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional.
2. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah.

2.1.3. Tujuan

Tujuan pembangunan perikanan budidaya yaitu :

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya;
 - b. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan budidaya secara berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan.
3. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di UPT BPBL Lombok, yakni meningkatkan kinerja reformasi birokrasi sebagai UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

2.1.4. Sasaran Kegiatan

Tujuan strategis pembangunan perikanan budidaya laut akan dicapai melalui sejumlah sasaran kegiatan yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada Triwulan I Tahun 2024 .

Sasaran Kegiatan pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai dijabarkan dalam lima perspektif dengan masing-masing IKU sebagai berikut :

1. Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah Nilai PNBP Satuan Kerja BPBL Lombok
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah :
 - a. Persentase bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat;
 - b. Persentase bantuan benih ikan yang disalurkan ke masyarakat;
 - c. Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi;
 - d. Persentase Bantuan Bibit Ruumput Laut yang disalurkan ke masyarakat;
 - e. Persentase Bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang disalurkan ke masyarakat;
 - f. Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar yang dimanfaatkan;
 - g. Persentase diseminasi teknologi Budi Daya Ikan ;
 - h. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang disalurkan.
3. Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang Kawasan dan Kesehatan ikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah :
 - a. Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan ;
 - b. Ruang Lingkup Laboratorium yang terakreditasi;
 - c. Persentase Pengujian Antimikrobia Resistance (AMR).
4. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah :
 - a. Indeks profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BPBL Lombok;
 - b. Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK;

- c. prosentase penyelesaian LHP BPK atas satker BPBL Lombok;
- d. Nilai PM SAKIP BPBL lombok;
- e. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok ;
- f. nilai IKPA lingkup satker BPBL Lombok ;
- g. NKA lingkup satker BPBL lombok;
- h. Tingkat kepatuhan pengadaan Barang dan Jasa lingkup satker BPBL Lombok ;
- i. Tingkat kepatuhan Pengelolaan barang milik negara lingkup satker BPBL Lombok;
- j. Persentase Pelaku Usaha perikanan Budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA;
- k. Indeks Pengelolaan kepegawaian ;
- l. Nilai Pengawasan Kearsipan;
- m. Persentase Layanan Perkantoran BPBL Lombok

2.1.5. Strategi dan Kebijakan

Strategi BPBL Lombok untuk berkontribusi langsung mengambil bagian untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya Tahun 2020-2024 adalah dengan mengimpelmentasikan kegiatan-kegiatan prioritas DJPB sebagai berikut :

a. Aspek sosial ekonomi:

Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya, dilaksanakan dengan komponen kegiatan prioritas sebagai berikut:

- Penyaluran bantuan induk unggul dan benih bermutu kepada kelompok pembudidaya untuk menghidupkan kembali usaha budidaya skala kecil, serta mengoptimalkan fungsi UPT dan UPTD serta unit pembenihan masyarakat untuk membantu kontinuitas usaha kelompok penerima bantuan tersebut;
- Penyaluran bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok pembudidaya, antara lain bibit/benih, pakan, obat ikan dan vitamin, pupuk serta peralatan, sebagai upaya stimulasi pengembangan usaha pembudidayaan ikan;
- Pengembangan kebun bibit rumput laut melalui pemberian bantuan bibit bermutu di kawasan sentra kebun bibit rumput laut.

b. Aspek teknologi produksi:

Meningkatkan produktivitas, daya saing ekonomi serta pemanfaatan

potensi sumberdaya perikanan budidaya, dilaksanakan dengan komponen kegiatan prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan kawasan perikanan budidaya (minapolitan) dengan mengintegrasikan rantai produksi dari hulu sampai hilir untuk efisiensi produksi;
- Peningkatan kualitas induk dan benih melalui sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) untuk menghasilkan unit pembenihan bersertifikat;
- Pelaksanaan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) untuk menghasilkan pembudidaya (pembesaran ikan) bersertifikat;
- Pengembangan Kebun Bibit Rumput Laut dengan sistem Kultur Jaringan
- Peningkatan kuantitas dan kualitas ikan non konsumsi (ikan hias, karang buatan, tanaman hias dll);
- Pengembangan sentra budidaya baru berbasis kawasan/klaster, dimana salah satu gebrakan KKP adalah pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau terluar Indonesia. Dalam hal ini, Ditjen Perikanan Budidaya ditugaskan untuk mengawal 3 kawasan SKPT, yaitu Sabang, Rote Ndao, dan Sumba Timur.
- Pelaksanaan budidaya lele sistem bioflok, yaitu teknologi budidaya lele intensif dengan mengandalkan suplai oksigen dan gumpalan (flok) mikroorganisme tertentu. Untuk tahap awal, fokus kegiatan bioflok dilakukan di pesantren, untuk kemudian diperluas ke wilayah lain. Tujuan bioflok adalah meningkatkan ketahanan pangan, memenuhi gizi protein santri, meningkatkan konsumsi makan ikan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta perekonomian pesantren dan masyarakat
- Pengembangan sarana input produksi inovatif di UPT Pusat, misalnya protein rekombinan, vaksin, enzim, probiotik, immunostimulan, rekayasa genetik, automatic feeder, karamba bulat, dll.

c. Aspek sumber daya alam dan lingkungan:

Mewujudkan kelestarian dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya, dilaksanakan dengan komponen kegiatan prioritas sebagai berikut:

- Penerapan perekayasa teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan dan sesuai dengan daya dukung;
- Pengembangan Culture Based Fisheries (CBF) dengan pendekatan komoditas multitrophic level.

- Pengembangan komoditas ikan spesifik lokal unggulan dan species ikan tahan perubahan lingkungan;
- Pengendalian plasma nutfah induk dan benih;

2.2. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN

Pelaksanaan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok pada Triwulan I Tahun 2024 difokuskan pada program pencapaian Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Pengelolaan perbenihan ikan
2. Pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan
3. Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
4. Dukungan manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Dimana dalam mencapai hal tersebut, telah didistribusikan melalui Klasifikasi Rincian Output yaitu : (i) Bantuan peralatan/sarana; (iii) Bantuan hewan; (iv) Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan ; (v) Penyidikan dan Pengujian Penyakit; (vi) Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan; (vii) Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi; (viii) Layanan dukungan manajemen internal; (ix) layanan manajemen SDM internal; (x) layanan manajemen kinerja internal.

Dalam mendukung rencana kerja tersebut, BPBL Lombok mendapatkan pagu anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 sebesar **Rp. 28.057.854.000- (Dua Puluh Delapan Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)**. Berikut adalah nilai pagu berdasarkan kegiatan :

- a. Pengelolaan perbenihan ikan sebesar Rp. 3.846.476.000
- b. Pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan sebesar Rp. 461.289.000
- c. Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan sebesar Rp. 11.610.000.000
- d. Dukungan manajemen internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp. 12.140.089.000

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja

aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, penetapan kinerja BPBL Lombok tahun 2024. Berikut adalah perjanjian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAR www.kkp.go.id SUBEL sp@kp.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Wawan Cahyono Ashuri
Jabatan : Ptl. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Tb. Haeru Rahayu
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Ptl. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Wawan Cahyono Ashuri

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	1. Nilai PNBSP Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Rupiah)	781.085.000
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	2. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
	3. Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
	4. Calon Induk Unggul Ikan Laut yang Diproduksi (Ekor)	3.476
	5. Persentase Bantuan Bibit Rumpul Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
	6. Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumpul Laut (KBRL) yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
	7. Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar yang Dimanfaatkan (Persen)	100
	8. Persentase Diseminasi Teknologi Budi Daya Ikan (Persen)	100
	9. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang Disalurkan (Persen)	100
	10. Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (Persen)	100
3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang		

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Kawasan dan Kesehatan Ikan	11. Ruang Lingkup Laboratorium yang Terakreditasi (Parameter)	7
	12. Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) (Persen)	100
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	13. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Lombok (Persen)	85
	14. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
	15. Prosentase Penyelesaian LHP BPK Atas Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Persen)	100
	16. Nilai PM SAKIP Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Nilai)	82
	17. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Persen)	80
	18. Nilai IKPA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Nilai)	93,76
	19. NKA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Nilai)	86
	20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Nilai)	80

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	21. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Nilai)	80
	22. Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budidaya yang Terintegrasi dengan Data KUSUKA (Persen)	80
	23. Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4
	24. Nilai Pengawasan kearsipan (Nilai)	75
	25. Persentase Layanan Perkantoran BPBL Lombok (Persen)	80

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Ptl. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Wawan Cahyono Ashuri

DATA ANGGARAN :

NO	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Perbenihan Ikan	3.846.476.000
2.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	481.289.000
3.	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	12.150.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	12.140.089.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok Tahun 2024		28.597.854.000

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Tb. Haeru Rahayu

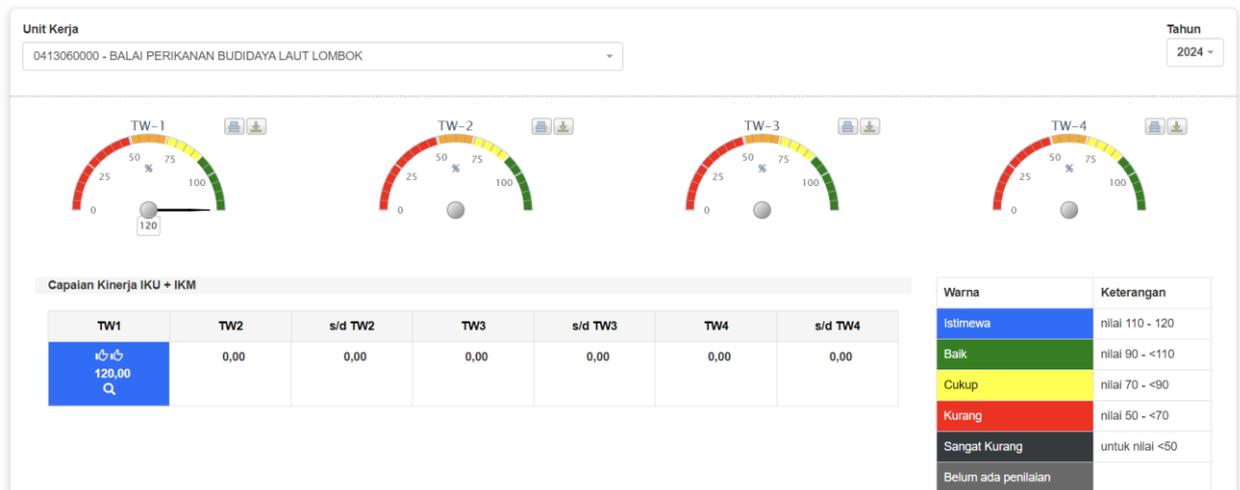
Pihak Pertama
Pit. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
Wawan Cahyono Ashuri

Gambar 5. Perjanjian kinerja Tahun 2024

2.4. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implementasi aplikasi BSC “kinerjaku” yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian rata-rata Indikator Kinerja Utama (IKU)+IKM Pada Triwulan I Tahun 2024 ini adalah sebesar 120 % atau masuk dalam kategori ISTIMEWA (Biru). Berikut adalah hasil hasil *Screenshot* dari aplikasi Kinerjaku BPBL Lombok.



Gambar 6. Screenshot aplikasi Kinerjaku

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, berdasarkan sistem aplikasi Kinerjaku, diperoleh Nilai sebesar 1200%. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN (2024)	Target	Realisasi s/d TW I	Realisasi Terhadap Target TW I (%)	Realisasi terhadap Target 2024 (%)
			TW I			
Ekonomi Sektor perikanan budidaya meningkat di wilayah kerja BPBL Lombok	Nilai PNBP yang diperoleh (Rupiah)	781,085,000	179,590,000	368,765,482	205.34	47.21
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase bantuan calon induk yang disalurkan (Persen)	75	0	0.00	0.00	0.00
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase bantuan benih yang disalurkan (Persen)	75	0	21.25	0.00	28.33
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi (ekor)	3,476	0	0	0.00	0.00
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat (persen)	75	0	20	0.00	26.67
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang disalurkan ke masyarakat (persen)	75	0	0	0.00	0.00

Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar yang dimanfaatkan (Persen)	100	-	0	0.00	0.00
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase diseminasi teknologi budi daya ikan (Persen)	100	100	100	100.00	100.00
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang disalurkan (Persen)	100	-	0	0.00	0.00
Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Bidang Kawasan dan kesehatan ikan	Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (Persen)	100	20	112.95	564.75	112.95
Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Bidang Kawasan dan kesehatan ikan	Ruang Lingkup Laboratorium yang terakreditasi (parameter)	7	0	0	0.00	0.00
Meningkatnya kualitas Pengendalian kesehatan ikan	Persentase Pengujian Antimikrobial Resistance (AMR) (%)	100	15	45.71	304.73	45.71
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BPBL Lombok (Indeks)	85	-	0	0.00	0.00

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76	-	0	0.00	0.00
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Lombok (Persen)	100	-	0	0.00	0.00
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Nilai PM SAKIP BPBL Lombok (Nilai)	82	-	0	0.00	0.00
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Lombok (Persen) kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	80	80	100	125.00	125.00
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Nilai IKPA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Nilai)	93.76	-	0	0.00	0.00
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Nilai Kinerja Anggaran Satker BPBL Lombok (Nilai)	86	-	0	0.00	0.00
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok (Nilai)	80	-	0	0.00	0.00

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Nilai)	80.0	-	0	0.00	0.00
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA (persen)	80	-	0	0.00	0.00
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Indeks pengelolaan kepegawaian (indeks)	4	-	0	0.00	0.00
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Nilai Pengawasan kearsipan (nilai)	75	-	0	0.00	0.00
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Persentase Layanan Perkantoran BPBL Lombok (nilai)	80	-	0	0.00	0.00

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 :

Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat di BPBL Lombok

1. Nilai PNBP Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. PNBP BPBL Lombok diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2022 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana Nilai PNBP BPBL Lombok berasal dari pendapatan yang dihitung dari penerimaan umum, penerimaan fungsional, dan penerimaan lain-lain.

Pada Tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu tidak tercapainya target PNBP Tahun 2023.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan I ini adalah melakukan perencanaan dan analisa data untuk perolehan PNBP 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. Perencanaan perolehan PNBP

Target	Januari	Februari	Maret	SUM TW I	April	Mei	Juni	SUM TW I - TW II	Juli	Agustus	September	SUM TW I - TW III	Oktober	November	Desember	SUM TW I - IV
PNBP BPBL Lombok																
Rumput Laut	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	7,000,000	13,000,000	-	-	7,000,000	20,000,000	-	-	-	20,000,000
lobster	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	50,000,000	65,000,000	-	-	45,000,000	110,000,000	-	-	40,000,000	150,000,000
ikan hias	-	-	500,000	500,000	-	-	-	500,000	-	-	2,250,000	2,750,000	-	-	2,250,000	5,000,000
tiram mutiara	-	-	9,775,000	9,775,000	-	-	-	9,775,000	-	16,362,500	-	26,137,500	-	16,362,500	-	42,500,000
bawal bintang konsumsi dan calin kakap perthi	18,428,000	9,423,000	30,000,000	57,851,000	33,000,000	22,000,000	16,000,000	128,851,000	22,000,000	33,000,000	25,000,000	208,851,000	33,000,000	24,149,000	34,000,000	300,000,000
benih bawal bintang	5,400,000	13,500,000	36,000,000	54,900,000	-	10,000,000	12,000,000	76,900,000	9,000,000	-	9,000,000	94,900,000	-	16,000,000	-	110,900,000
abalone	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	2,500,000	7,500,000	-	-	2,500,000	10,000,000
Labi kesling	10,012,000	2,955,000	2,955,000	15,922,000	10,000,000	14,078,000	10,000,000	50,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	80,000,000	7,000,000	7,000,000	6,000,000	100,000,000
asrama	5,920,000	4,380,000	4,380,000	14,680,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	29,680,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	44,680,000	4,000,000	3,000,000	3,000,000	54,680,000
rumah dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor B.2528/DJPB.1/KU.340/IV/2024 tanggal 16 April 2024 perihal Capaian Realisasi PNBP Lingkup DJPB Triwulan I Tahun 2024, diketahui bahwa capaian PNBP BPBL Lombok pada Triwulan I Tahun 2024 ini adalah Rp. 368.765.482 atau 205,34% dari target PNBP Triwulan I sebesar Rp. 179.590.000

Perbandingan dari waktu ke waktu

Capaian PNBP BPBL Lombok pada Triwulan I Tahun 2024 ini naik sebesar 115.52% dari capaian PNBP Triwulan I Tahun 2023, adapun tampilan secara singkat atas capaian PNBP adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Nilai PNBP BPBL Lombok

Nama SK :Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya meningkat di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok						
Nama Indikator : Nilai PNBP Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok						
Triwulan I Tahun 2024			Realisasi	Perbandingan Realisasi	Target 2024	Realisasi Terhadap
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2023	Triwulan I Tahun 2024 thd Triwulan I Tahun 2023 (%)		Target Tahunan (%)
179,590,000	368,765,482	205.34%	171,099,708	115.52	781,085,000	47.21%

Perbandingan antar sub unit kerja

Nilai PNBP yang diperoleh BPBL Lombok pada Triwulan I Tahun 2024 ini paling tinggi dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis DJPB lainnya. Berikut adalah gambar realisasi PNBP BPBL Lombok dibandingkan dengan Unit pelaksana Teknis (UPT) Lingkup DJPB lainnya :

Tabel 4. Perbandingan realisasi PNBP antar UPT

No.	KODE SATKER	NAMA SATUAN KERJA	TARGET SESUAI PK	REALISASI S/D CAPAIAN IKU	% SESUAI PK	S / D BULAN
1	2	3	4	5	6	7
REALISASI PENDAPATAN PNBP						
1	632462	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Pusat)	Rp 50.000.000	Rp 152.494.486	304,99	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 50.000.000	Rp 56.499.999	113,00	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 95.994.487		
2	445393	BLU Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	Rp 27.358.090.000	Rp 428.100.841	1,56	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 27.358.090.000	Rp 128.263.491		
	II	Pendapatan Badan Layanan Umum	Rp -	Rp 295.756.070	1,56	
	III	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 6.081.280		
3	239192	BLU Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	Rp 4.500.400.000	Rp 468.236.198	10,43	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 4.500.400.000	Rp 23.558.058	10,28	
	II	Pendapatan Badan Layanan Umum	Rp -	Rp 438.054.508		
	III	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 6.623.634		
4	238734	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	Rp 1.590.081.000	Rp 323.516.841	20,35	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.590.081.000	Rp 313.905.511	19,74	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 9.611.330		
5	427706	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	Rp 1.189.308.000	Rp 204.519.850	17,20	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.189.308.000	Rp 204.502.659	17,20	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 17.191		
6	567350	BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	Rp 3.552.374.000	Rp 530.693.024	14,94	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 3.552.374.000	Rp 10.519.000	14,38	
	II	Pendapatan Badan Layanan Umum	Rp -	Rp 499.583.163		
	III	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 20.590.861		
7	237657	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi	Rp 1.555.000.000	Rp 217.718.300	14,00	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.555.000.000	Rp 177.996.000	11,45	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 39.722.300		
8	567680	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	Rp 1.683.158.000	Rp 353.660.042	21,01	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.683.158.000	Rp 353.660.042	21,01	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp -		

9	567385	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee	Rp	1.232.517.000	Rp	303.540.101	24,63	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	1.232.517.000	Rp	302.541.388	24,55	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	998.713		
10	567474	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	Rp	1.274.795.000	Rp	232.912.825	18,27	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	1.274.795.000	Rp	231.744.015	18,18	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	1.168.610		
11	567584	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	Rp	1.214.288.000	Rp	336.480.089	27,71	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	1.214.288.000	Rp	336.480.089	27,71	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	-		
12	538911	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu	Rp	1.212.600.000	Rp	103.429.321	8,53	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	1.212.600.000	Rp	101.369.694	8,36	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	2.059.627		
13	567720	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Rp	968.400.000	Rp	169.655.009	17,52	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	968.400.000	Rp	157.915.445	16,31	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	11.739.564		
14	567762	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Rp	781.085.000	Rp	368.765.482	47,21	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	781.085.000	Rp	201.370.232	25,78	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	167.395.250		
15	567800	Balai Penguji Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	Rp	1.100.000.000	Rp	295.242.070	26,84	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	1.100.000.000	Rp	295.242.070	26,84	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	-		
16	445394	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem	Rp	723.400.000	Rp	184.168.087	25,46	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	723.400.000	Rp	183.664.597	25,39	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	303.470		
		JUMLAH PENDAPATAN FUNGSIONAL + UMUM (I)	Rp	49.985.496.600	Rp	3.077.232.270	8,63	
		JUMLAH PENDAPATAN BLU (II)	Rp	-	Rp	1.234.393.739		
		JUMLAH NON ANGGARAN (III)	Rp	-	Rp	362.606.317		
		JUMLAH PENDAPATAN I + II + III	Rp	49.985.496.600	Rp	4.674.132.326	9,35	CAPAIAN IKU

Gambar 7. Realisasi PNPB Tahun 2024

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan Pada Triwulan I Tahun 2024 terdapat permasalahan yaitu meskipun nilai PNPB BPBL Lombok paling tinggi dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis lainnya, namun sebagian besar dari pendapatan non anggaran.

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah meningkatkan nilai PNPB dari potensi sumber PNPB di BPBL Lombok.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 :

Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan

2. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke masyarakat

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 442 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Calon Induk Ikan Tahun Anggaran 2024 , BPBL Lombok sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJPB bertanggung jawab mendistribusikan bantuan calon induk kepada masyarakat. Spesifikasi bantuan calon induk yang diberikan yaitu :

- Apabila bantuan yang diberikan adalah Nila, maka minimal berat ikan yang harus disalurkan adalah 50 gram/ekor;
- Apabila bantuan yang diberikan adalah Kakap Putih, maka minimal berat ikan yang harus disalurkan adalah 300 gram/ekor;
- Apabila bantuan yang diberikan adalah Bawal Bintang, maka minimal berat ikan yang harus disalurkan adalah 300 gram/ekor.

Pada Tahun 2023 Permasalahan yang terjadi adalah BPBL Lombok mengalami kesulitan dalam melakukan penyaluran bantuan calon induk air tawar karena BPBL sendiri merupakan unit kerja yang memproduksi ikan laut.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan ini adalah telah dilaksanakan koordinasi dengan DJPB sehingga detail pada daftar isian bantuan dan rincian target bantuan pelaksanaan anggaran (DIPA) TA 2024 ini bersifat umum, tidak membedakan bantuan air tawar atau air laut.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I ini belum ada kegiatan bantuan calon induk yang dilaksanakan, baik dari perencanaan maupun penyaluran

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 6.638.000 dimana pada Triwulan I ini belum ada realisasi anggaran.

Perbandingan dari waktu ke waktu

Bantuan Calon Induk pada Triwulan I Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2023 karena pada Triwulan I belum ada capaian bantuan, berikut adalah Tabel persentas bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat :

Tabel 5. Bantuan calon induk yang disalurkan

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan						
Nama Indikator : Persentase bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat						
Triwulan I Tahun 2024			Realisasi	Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2024 thd Triwulan	Target 2024	Realisasi Terhadap
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2023			Target Tahunan (%)
-	-	0.00%	0	0	75	0.00%

Dari Tahun 2019, BPBL Lombok pernah melakukan penyaluran bantuan calon induk yaitu pada Tahun 2021 dan 2023. Berikut adalah grafik perkembangan penyaluran bantuan Calon Induk sejak tahun 2019 :

Tabel 6. Perkembangan penyaluran bantuan Calon Induk

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
-	-	1,110	-	171.25%	75	-	0.00%

Perbandingan antar sub unit kerja

Bantuan calon induk BPBL Lombok sama dengan BBPBL Lampung, BPBL Ambon dan BPBL Batam yaitu belum ada capaian bantuan calon induk pada Triwulan I Tahun 2024.

Permasalahan yang terjadi pada Triwulan I Tahun 2024 adalah BPBL Lombok belum melakukan perencanaan dalam kegiatan penyaluran bantuan calon induk karena belum ada penerima bantuan yang mengajukan proposal bantuan calon induk

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah koordinasi dengan Ditjen PB terkait dengan syarat-syarat penerima bantuan calon induk yang memenuhi ketentuan untuk menerima bantuan

3. Persentase Bantuan Benih Ikan yang disalurkan ke masyarakat

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 381 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Tahun Anggaran 2024, BPBL Lombok sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJPB bertanggung jawab mendistribusikan bantuan benih ikan laut kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan kepada kelompok penerima bantuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bawal bintang ukuran minimal 2,5 cm
- b. Kakap putih ukuran minimal 2,5 cm
- c. Abalone ukuran minimal 2 cm
- d. Ikan hias laut ukuran minimal 2 cm
- e. Tiram mutiara ukuran minimal 1 cm

Pada Tahun 2023 permasalahan yang terjadi adalah indukan kakap putih yang secara jumlah dan kualitas sempat mengalami penurunan dan banyaknya yang berubah dari jenis jantan ke betina

Perbaikan yang sudah dilakukan adalah membeli indukan kakap putih dari BPBL Ambon sehingga target bantuan benih pada Tahun 2023 dapat tercapai.

Pada Triwulan I juga telah dilakukan penyusunan perencanaan bantuan benih yang akan disalurkan pada Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 7. Perencanaan Bantuan benih yang didistribusikan ke masyarakat

Bantuan	Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	TOTAL TARGET
Benih ikan		20,000.00	50,000.00	24,935.00	50,000.00	30,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	32,500.00	20,000.00	26,000.00	343,435

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Target bantuan benih pada Tahun 2024 baru akan diperhitungkan pada Triwulan II, namun pada Triwulan I BPBL Lombok sudah melakukan penyaluran bantuan benih sebanyak 73.000 ekor atau 21,26% dari target 343.435 ekor ke wilayah Kupang, Bima, dan Lombok Barat. Berikut adalah tabel capaian dan dokumentasi bantuan benih ikan :

Tabel 8. Bantuan benih yang didistribusikan ke masyarakat

No	Jenis Bantuan	Penerima	Nama Kelompok	Provinsi	Kab/Kota	Ukuran	Tanggal Distribusi	Komoditas	Jumlah Benih (ekor)	Keterangan BAST	SK Penerima	
REALISASI BANTUAN BENIH BPBL LOMBOK TAHUN 2024										73,000		
Bulan Januari - 2024												
1	Bantuan benih ikan	Nus Absalom Adu	POKDAKAN Ita Esa	NTT	Kupang	4-5 cm	16 Januari 2024	Kakap Putih	4,000	No. B.136/BPBL-L/PB.140/I/2024	No. B.116/BPBL-L/PB.150/BB/I/2024	
2	Bantuan benih ikan	Karel Ferdinan Balle	POKDAKAN KUB Imanuel	NTT	Kupang	4-5 cm	16 Januari 2024	Kakap Putih	4,000	No. B.137/BPBL-L/PB.140/I/2024	No. B.116/BPBL-L/PB.150/BB/I/2024	
3	Bantuan benih ikan	Joni Rassa	POKDAKAN KUB Kapala Batu	NTT	Kupang	4-5 cm	16 Januari 2024	Kakap Putih	4,000	No. B.138/BPBL-L/PB.140/I/2024	No. B.116/BPBL-L/PB.150/BB/I/2024	
4	Bantuan benih ikan	Amadin Al Gazali Karudin	POKDAKAN 96 Fish	NTT	Kupang	4-5 cm	16 Januari 2024	Kakap Putih	4,000	No. B.139/BPBL-L/PB.140/I/2024	No. B.116/BPBL-L/PB.150/BB/I/2024	
5	Bantuan benih ikan	Asri	POKDAKAN So Ati	NTB	Bima	4-5 cm	18 Januari 2024	Kakap Putih	8,000	No. B.171/BPBL-L/PB.140/I/2024	No. B.116/BPBL-L/PB.150/BB/I/2024	
6	Bantuan benih ikan	Herimansyah	POKDAKAN So Nau Hill	NTB	Bima	4-5 cm	18 Januari 2024	Kakap Putih	8,000	No. B.172/BPBL-L/PB.140/I/2024	No. B.116/BPBL-L/PB.150/BB/I/2024	
7	Bantuan benih ikan	Adhar	POKDAKAN KJA Bonto	NTB	Bima	4-5 cm	18 Januari 2024	Kakap Putih	8,000	No. B.173/BPBL-L/PB.140/I/2024	No. B.116/BPBL-L/PB.150/BB/I/2024	
8	Bantuan benih ikan	Nurdin	KUB Usaha Bersama	NTB	Bima	4-5 cm	18 Januari 2024	Kakap Putih	8,000	No. B.174/BPBL-L/PB.140/I/2024	No. B.116/BPBL-L/PB.150/BB/I/2024	
Bulan Februari - 2024												
NIHIL												
Bulan Maret - 2024												
1	Bantuan benih ikan	Latu Sukri	POKDAKAN Beriuq Ures	NTB	Lombok Barat	4-5 cm	26 Maret 2024	Kakap Putih	12,500	No. B.852/BPBL-L/PB.140/III/2024	No. B.753/BPBL-L/PB.140/III/2024	
2	Bantuan benih ikan	Herwin Aminudin	POKDAKAN Bangun Bersama	NTB	Lombok Barat	4-5 cm	26 Maret 2024	Kakap Putih	12,500	No. B.853/BPBL-L/PB.140/III/2024	No. B.753/BPBL-L/PB.140/III/2024	



Gambar 8. Dokumentasi penyerahan bantuan Benih Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.950.708.000 dimana pada Triwulan I Tahun 2024 ini telah terealisasi sebesar Rp 611.656.696 atau 31,36% dari pagu untuk kegiatan perencanaan dan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Perbandingan dari waktu ke waktu

Bantuan Benih pada Trwulan I Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2023 karena pada Triwulan I Tahun 2023 belum ada capaian bantuan, berikut adalah Tabel persentase bantuan benih yang disalurkan ke masyarakat :

Tabel 9. Prosentase bantuan benih yang disalurkan ke masyarakat

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan						
Nama Indikator :Persentase Bantuan Benih Ikan yang disalurkan ke masyarakat						
Triwulan I Tahun 2024			Realisasi	Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2024 thd Triwulan I	Target 2024	Realisasi Terhadap
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2023			Target Tahunan (%)
-	21.26	0.00%	0.00	0	75	28.35%

Dari Tahun 2019, BPBL Lombok telah rutin melakukan penyaluran bantuan benih ke beberapa wilayah di Indonesia. Berikut adalah tabel perkembangan penyaluran bantuan benih sejak tahun 2019 :

Tabel 10. Perkembangan penyaluran bantuan benih

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
771,000	866,264	832,850	815,500	116.08%	75	21.26	28.35%

Perbandingan antar sub unit kerja

Bantuan benih BPBL Lombok prosentase capaiannya lebih rendah daripada BPBL Ambon namun lebih tinggi daripada BBPBL Lampung dan BPBL Batam. Berikut adalah tabel perbandingan antar sub unit kerja UPT Laut :

Tabel 11. perbandingan antar sub unit kerja UPT Laut

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	75	21.26	28.35
BPBL Ambon	75	66.34	88.45
BPBL Batam	75	15.58	20.77
BBPBL Lampung	75	4.95	6.60

Pada Triwulan I Tahun 2024 terdapat permasalahan yaitu banyaknya permintaan bantuan benih dari jalur reguler di wilayah NTB, sehingga biaya distribusi terserap cukup besar. Dikhawatirkan pada Triwulan II nanti biaya distribusi tidak mencukupi untuk bantuan benih jalur aspirasi di wilayah luar NTB.

Tindak lanjut pada Triwulan II Tahun 2024 adalah koordinasi dengan Tenaga Ahli terkait bantuan dari jalur aspirasi di wilayah kerja BPBL Lombok

4. Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi

Produksi calon induk unggul adalah kegiatan produksi calon induk unggul dari BPBL Lombok untuk mendukung ketersediaan kebutuhan induk unggul. Cara penghitungan IKU ini adalah dengan menghitung hasil produksi calon Induk BPBL Lombok yaitu : Tiram Mutiara, Abalone, Ikan Hias, bawal bintang dan kakap putih.

Pada Triwulan sebelumnya terdapat permasalahan yaitu adanya serangan penyakit ikan pada calon induk ikan.

Perbaikan yang sudah dilakukan adalah Tim Pokja kesehatan ikan dan lingkungan memberikan rekomendasi kepada Tim pokja KJA untuk melakukan perendaman dengan air tawar dengan penambahan oksitetrasiklin sebanyak 3 ppm tiap seminggu sekali terhadap calon induk yang terkena penyakit.

Pada Triwulan I Tahun 2024 telah dilakukan penyusunan perencanaan Target produksi calon induk Unggul pada Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 12. Target Produksi Calon Induk Unggul

Komoditas	Januari	Februari	Maret	TW I	April	Mei	Juni	TW II	Juli	Agustus	September	TW III	Oktober	November	Desember	TOTAL TARGET
Abalone					0		250	250					250		270	520
Ikan Hias					0			0					0	1100		1100
Tiram Mutiara					0		200	200			320		520		260	780
Bawal Bintang					0			0					0	776		776
Kakap Putih					0			0					0	300		300
TOTAL PRODUKSI CALON INDUK UNGGUL																3476

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2024 ini belum ada capaian produksi calon induk unggul, karena hingga Triwulan I ini belum tercapai ukuran dan berat yang memenuhi standar calon induk unggul.

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 929.130.000 dimana pada Triwulan I Tahun 2024 ini telah terealisasi sebesar Rp 374.560.000 atau 40,31% dari pagu untuk kegiatan operasional produksi calon induk finfish.

Perbandingan dari waktu ke waktu

Produksi calon induk unggul pada Trwulan I Tahun 2024 turun sebesar 100% dibandingkan dengan produksi calon induk unggul Triwulan I Tahun 2023, berikut adalah Tabel capaian produksi calon induk unggul :

Tabel 13. Capaian produksi calon induk unggul

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan						
Nama Indikator : Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi						
Triwulan I Tahun 2024			Realisasi	Perbandingan Realisasi	Target 2024	Realisasi Terhadap
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2023	Triwulan I Tahun 2024		Target Tahunan (%)
0	0	0.00%	65.00	-100	3476	0.00%

Dari Tahun 2019, BPBL Lombok telah rutin melakukan kegiatan produksi calon induk unggul. Berikut adalah perkembangan produksi calon induk unggul sejak tahun 2019 :

Tabel 14. Perkembangan Calon Induk Unggul yang diproduksi

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
3,850	3,780	2,750	2,226	127.21%	3476	0	0.00%

Perbandingan antar sub unit kerja

Calon Induk Unggul ikan laut yang diproduksi BPBL Lombok prosentase capaiannya lebih rendah dibandingkan dengan BBPBL Lampung, BPBL Ambon dan BPBL Batam. Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 15. perbandingan capaian calon induk unggul ikan laut yang diproduksi antar sub unit kerja UPT Laut

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	3476	0	0.00
BPBL Ambon	4090	181	4.43
BPBL Batam	100	25.3	25.30
BBPBL Lampung	4305	60	1.39

Pada Triwulan I Tahun 2024 terdapat permasalahan yaitu belum tercapainya ukuran dan berat ikan yang memenuhi standar calon induk unggul.

sehingga tindak lanjut pada Triwulan berikutnya adalah optimalisasi pemeliharaan calon induk unggul yang diproduksi.

5. Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 380 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah berupa Bibit Rumput Laut Tahun Anggaran 2024, BPBL Lombok sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJPB bertanggung jawab mendistribusikan bantuan bibit rumput laut kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan kepada kelompok penerima bantuan dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Strain :
 - *Kappaphycus alvarezzi / Eucheuma cottonii*
 - *Kappaphycus Striatum/Sakul*
 - *Eucheuma Spinosum*
 - *Gracilaria Sp* dan/atau
 - Jenis lainnya sesuai dengan karakteristik perairan.
- Bibit hasil kultur jaringan atau bibit lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan asal atau hasil verifikasi oleh UPT DJPB atau dinas prov/kab/kota;
- Thalus : Bercabang banyak, bersih, tidak berlendir, tidak patah, sehat dan tidak ditempeli lumut dan organisme lainnya

Pada Triwulan I Tahun 2024 telah dilakukan penyusunan perencanaan Target Bantuan Bibit Rumput Laut Tahun 2024 sebanyak 5.000 unit sebagai berikut :

Tabel 16. Target Bantuan Bibit Rumput Laut

Jenis Bantuan	Januari	Februari	Maret	TW I	April	Mei	Juni	TW II	Juli	Agustus	September	TW III	Oktober	November	Desember	TOTAL TARGET
Bantuan Bibit RL				-				-		1000	1000	2,000	1000	1000	1000	5,000

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2024 ini telah disalurkan bantuan sebanyak 1.000 unit atau 20% dari target (5.000 unit), berikut adalah tabel penyaluran bantuan bibit Rumput Laut dan dokumentasi penyerahan bantuan Bibit Rumput Laut :

Tabel 17. Capaian bantuan bibit Rumput Laut

Bulan	Jumlah Bantuan Bibit Rumput Laut	Jumlah Kumulatif Bantuan Bibit Rumput Laut	Prosentas bibit
Januari	-	-	
Februari	1,000	1,000	
Maret	-	1,000	



Gambar 9. Dokumentasi Penyaluran bantuan Bibit Rumput Laut

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 190.000.000 dimana pada Triwulan I Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp 122.640.182 atau 64,55% dari pagu untuk kegiatan pelaksanaan dan distribusi ke wilayah Wakatobi

Perbandingan dari waktu ke waktu

Bantuan Bibit Rumput Laut pada Triwulan I Tahun 2024 tidak bisa dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2023 karena pada Tahun 2023 tidak ada bantuan bibit Rumput Laut, berikut adalah Tabel capaian bantuan bibit Rumput Laut :

Tabel 18. Prosentase Bantuan Bibit Rumput Laut

Nama SK : Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan							
Nama Indikator : Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat							
Triwulan I Tahun 2024			Realisasi	Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2024 thd	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2023				
0	0	0.00%	0	0	75	0.00%	

Dari Tahun 2019, sebanyak 2 kali BPBL Lombok telah melakukan penyaluran bantuan bibit Rumput Laut ke beberapa wilayah di Indonesia. Berikut adalah tabel perkembangan penyaluran bantuan Bibit Rumput Laut sejak tahun 2019:

Tabel 19. Perkembangan penyaluran bantuan bibit Rumput Laut

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
	40,000	6,250	-	-	75	20	26.67%

Perbandingan antar sub unit kerja

Bantuan Bibit Rumput Laut BPBL Lombok capaiannya lebih tinggi dari BPBL Batam namun lebih rendah dari BPBL Ambon dan BBPBL Lampung. Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 20. Perbandingan antar UPT Laut DJPB

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	75	20	26.67
BPBL Ambon	75	64.79	86.39
BPBL Batam	75	0	0.00
BBPBL Lampung	75	50	66.67

Pada Triwulan I Tahun 2024 permasalahan yang dihadapi adalah produksi bibit Rumput Laut BPBL Lombok yang kurang produktif karena pada Oktober sampai dengan Desember 2023 cuaca panas cukup ekstrim dan gelombang besar di laut.

Tindak lanjut Pada Triwulan II Tahun 2024 adalah mencoba menanam kembali bibit Rumput Laut pada Triwulan I dimana baru akan terlihat hasilnya nanti di Triwulan II

6. Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang disalurkan ke masyarakat

Kebun Bibit Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya nomor 377 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Kebun Bibit Rumput Laut Tahun Anggaran 2024 merupakan bantuan pemerintah berupa barang yaitu sarana dan prasarana KBRL dengan metode :

- 1) Longline;
- 2) Rakit apung; dan
- 3) Lepas dasar.

Pada Triwulan sebelumnya permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya penyesuaian rincian output akibat adanya *Automatic Adjustment*.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada saat itu yaitu dilakukan penyesuaian rincian output dari sebesar 20 paket menjadi 15 paket.

Pada Triwulan I Tahun 2024 telah dilakukan penyusunan perencanaan Target bantuan KBRL sebanyak 14 paket sebagai berikut :

Tabel 21. Target Bantuan KBRL

Jenis Bantuan	Januari	Februari	Maret	TW I	April	Mei	Juni	TW II	Juli	Agustus	September	TW III	Oktober	November	Desember	TOTAL TARGET
Bantuan KBRL				-	4	6		10	4			14				14

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2024 ini belum ada kegiatan bantuan KBRL yang disalurkan ke masyarakat karena masih dalam tahap identifikasi dan verifikasi, berikut adalah dokumentasi kegiatan identifikasi dan verifikasi KBRL di wilayah Sumbawa :



Gambar 10. Kegiatan Identifikasi dan verifikasi KBRL

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 770.000.000 dimana pada Triwulan I Tahun 2024 ini belum ada realisasi anggaran.

Perbandingan dari waktu ke waktu

Bantuan Bibit Rumput Laut pada Triwulan I Tahun 2024 sama dengan Triwulan I Tahun 2023 yaitu belum ada bantuan KBRL yang disalurkan ke masyarakat. Berikut adalah Tabel capaian bantuan bibit Rumput Laut :

Tabel 22. Persentase bantuan sarana KBRL yang disalurkan ke masyarakat

Nama SK : Meningkatkan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan							
Nama Indikator : Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang disalurkan ke masyarakat							
Triwulan I Tahun 2024				Realisasi	Perbandingan Realisasi	Target 2024	Realisasi Terhadap
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2023	Triwulan I Tahun 2024 thd	Target Tahunan (%)		
75	0	0.00%	0	0	75	0.00%	

Dari Tahun 2019, BPBL Lombok telah beberapa kali telah melakukan penyaluran bantuan KBRL ke beberapa wilayah di Indonesia. Berikut adalah tabel perkembangan penyaluran bantuan KBRL sejak tahun 2019:

Tabel 23. Perkembangan penyaluran bantuan KBRL

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
20	-	10	20	100	75	0	0.00%

Perbandingan antar sub unit kerja

Bantuan sarana KBRL BPBL Lombok capaiannya sama dengan BPBL Batam, BPBL Ambon, dan BBPBL Lampung yaitu belum ada capaian bantuan pada Triwulan I Tahun 2024.

Pada Triwulan I Tahun 2024 permasalahan yang dihadapi adalah kelengkapan administrasi yang memakan waktu agak lama karena harus melakukan pembaharuan data

Tindak lanjut Pada Triwulan berikutnya adalah aktif koordinasi dengan kelompok penerima bantuan supaya proses administrasi cepat terselesaikan

7. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang dimanfaatkan

Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang dimanfaatkan merupakan sarana dan prasarana bioflok dimana berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 386 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah sarana dan prasarana budi Daya ikan lele atau ikan nila sistem bioflok Tahun Anggaran 2024, BPBL Lombok sebagai Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab menyalurkan bantuan bioflok sebanyak 54 paket dengan kriteria sebagai berikut :

a. benih ikan ;

- b.pakan ikan *starter 1*;
- c. pakan ikan *starter 2*;
- d. Pakan ikan *Grower* dan *finisher*;
- e. obat ikan dan vitamin;
- f. prasarana dan sarana operasional;
- g. peralatan perikanan;

Pada Triwulan sebelumnya permasalahan yang terjadi adalah adanya tambahan paket bantuan bioflok sebanyak 45 paket pada bulan Juli 2023.

Perbaikan yang sudah dilakukan adalah telah dilakukan percepatan penyaluran bantuan sehingga seluruh bantuan dapat tersalurkan tepat pada waktunya.

Pada Triwulan I Tahun 2024 telah dilakukan penyusunan perencanaan Target bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar (bioflok) sebanyak 54 paket sebagai berikut :

Tabel 24. Target Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar (bioflok)

Jenis Bantuan	Januari	Februari	Maret	TW I	April	Mei	Juni	TW II	Juli	Agustus	September	TW III	Oktober	November	Desember	TOTAL TARGET
Bantuan Bioflok							18	18			18	36	18			54

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2024 ini belum ada capaian bantuan penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar (bioflok) ke masyarakat karena masih dalam tahap identifikasi dan verifikasi. Berikut adalah dokumentasi kegiatan identifikasi dan verifikasi Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar (bioflok) di wilayah NTT :





Gambar 11.identifikasi dan verifikasi Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar (bioflok)

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.170.000.000 dimana pada Triwulan I Tahun 2024 ini telah terealisasi sebesar Rp. 139.215.535 atau 1,26 % dari pagu yang digunakan untuk Identifikasi dan verifikasi di wilayah Bali NTB, dan NTT.

Perbandingan dari waktu ke waktu

Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar (bioflok) pada Triwulan I Tahun 2024 sama dengan Triwulan I Tahun 2023 yaitu belum ada Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar (bioflok) yang disalurkan ke masyarakat. Berikut adalah Tabel capaian Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar (bioflok) :

Tabel 25. Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan							
Nama Indikator :Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar yang dimanfaatkan							
Triwulan I Tahun 2024			Realisasi	Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2024 thd Triwulan I	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2023			Target Tahunan (%)	
0	0	0.00%	0.00	0	100	0.00%	

Adapun dari Tahun 2019, BPBL Lombok mulai aktif menyalurkan Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar (bioflok) ke masyarakat sejak tahun 2020. Berikut adalah perkembangan Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar (bioflok) yang disalurkan ke masyarakat :

Tabel 26. Perkembangan penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar (bioflok)

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
-	5	12	17	100%	100	0	100.00%

Perbandingan antar sub unit kerja

Capaian IKU Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar di BPBL Lombok sama dengan BBPBL Lampung, BPBL Ambon dan BPBL Batam yaitu belum ada capaian pada Triwulan I Tahun 2024.

Pada Triwulan I Tahun 2024 terdapat permasalahan yaitu usulan kelompok dan kelengkapan administrasi yang memakan waktu agak lama karena merupakan kelompok baru

Tindak lanjut Pada Triwulan berikutnya adalah aktif koordinasi dengan kelompok penerima bantuan supaya proses administrasi cepat terselesaikan.

8. Persentase Diseminasi Teknologi Budi Daya Ikan

Diseminasi adalah suatu kegiatan yang interaktif dalam menyampaikan informasi yang mana ditujukan kepada kelompok masyarakat ataupun individu.

Pada Tahun 2023 permasalahan yang terjadi adalah jadwal pelaksanaan diseminasi teknologi yang tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan

Perbaikan yang sudah dilakukan adalah telah melaksanakan koordinasi secara lebih intensif kepada tenaga ahli (TA) sehingga diseminasi teknologi dapat terlaksana seluruhnya.

Pada Triwulan I Tahun 2024 ini BPBL Lombok melakukan percepatan kegiatan diseminasi teknologi sehingga sebanyak 3 (tiga) kegiatan diseminasi teknologi di NTB dan NTT dapat terlaksana secara tepat waktu.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2024 ini telah dilaksanakan diseminasi teknologi sebanyak 3 (tiga) kali di wilayah NTT dan NTB. Berikut adalah dokumentasi ketiga diseminasi teknologi tersebut :

No	LOKASI DISEMINASI TEKNOLOGI	DOKUMENTASI
1.	Kab.Sikka, Nusa Tenggara Timur	
2.	Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat	
3.	Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat	

Gambar 12. Kegiatan Diseminasi Teknologi

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 300.000.0000 dimana pada Triwulan I Tahun 2024 ini telah terealisasi sebesar Rp. 285.303.278 atau 95,10% dari pagu yang digunakan untuk kegiatan diseminasi teknologi.

Perbandingan dari waktu ke waktu

IKU Persentase Diseminasi Teknologi Budi Daya pada Triwulan I Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2023 karena pada Triwulan I Tahun 2023 belum ada capaian kegiatan. Berikut adalah Tabel capaian Persentase Diseminasi Teknologi Budi Daya Ikan :

Tabel 27. Persentase diseminasi teknologi Budi Daya Ikan

Nama SK : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan						
Nama Indikator : Persentase Diseminasi Teknologi Budi Daya Ikan						
Triwulan I Tahun 2024			Realisasi	Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2024 thd Triwulan I	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2023			
100	100	100.00%	0	0	100	100.00%

IKU Persentase Diseminasi Teknologi baru ada pada Tahun 2023, Adapun tampilan secara singkat perkembangan capaian IKU persentase diseminasi teknologi Budi Daya ikan adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Perkembangan Diseminasi Teknologi Budi Daya Ikan

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
-	-	-	-	100	100	100	100.00%

Perbandingan antar sub unit kerja

Diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat di BPBL Lombok lebih rendah daripada Ambon namun sama dengan BBPBL Lampung dan lebih tinggi dari BPBL Batam. Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 29. Perbandingan prosentase Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	100	100	100.00
BPBL Ambon	100	110	110.00
BPBL Batam	100	90	90.00
BBPBL Lampung	100	100	100.00

Pada Triwulan I Tahun 2024 tidak ada permasalahan yang terjadi karena kegiatan telah selesai dilaksanakan tepat pada waktunya.

9. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang disalurkan

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 387 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Hias TA 2024, BPBL

Lombok sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJPB mendistribusikan bantuan Sarana dan Prasarana ikan hias kepada kelompok pembudidaya ikan, yaitu :

- a. Induk
- b. Pakan
- c. Wadah budi daya;
- d. Peralatan dan papan nama;
- e. Obat ikan dan vitamin;
- f. Sarana Budi Daya

Pada Triwulan sebelumnya permasalahan yang dihadapi adalah adanya *Automatic Adjustment* sehingga target berubah dari 10 paket menjadi 5 paket.

Perbaikan yang sudah dilakukan adalah melakukan penyesuaian rincian output sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan pada akhir tahun.

Pada Triwulan I Tahun 2024 telah dilakukan penyusunan perencanaan Target bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias sebanyak 2 paket sebagai berikut :

Tabel 30. Target bantuan sarana dan prasarana Budi Daya Ikan hias

Jenis Bantuan	Januari	Februari	Maret	TW I	April	Mei	Juni	TW II	Juli	Agustus	September	TW III	Oktober	November	Desember	TOTAL TARGET
Bantuan sarpras ikan hias				-				-			2	2				2

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2024 ini belum ada capaian bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias karena masih dalam tahap identifikasi dan verifikasi.

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dimana pada Triwulan I Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp 1.650.000 atau 1,65% dari pagu yang digunakan untuk kegiatan survey dan identifikasi.

Perbandingan dari waktu ke waktu

Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias pada Triwulan I Tahun 2024 sama dengan Triwulan I Tahun 2023 yaitu belum ada Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat. Berikut adalah Tabel capaian Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias :

Tabel 31. Persentase sarana dan prasarana budi daya ikan hias yang disalurkan

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan						
Nama Indikator : Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang disalurkan						
Triwulan I Tahun 2024			Realisasi	Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2024 thd Triwulan I	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2023			
0	0	0.00%	0	0	100	0.00%

Dari Tahun 2019, BPBL Lombok melakukan penyaluran bantuan sarana dan prasarana ikan hias yaitu pada Tahun 2020 dan 2021. Berikut adalah perkembangan penyaluran bantuan sarana dan prasarana budi daya ikan hias sejak tahun 2019 :

Tabel 32. Perkebangan bantuan sarana dan prasarana budi daya ikan hias

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
-	6	15	-	100%	100	0	0%

Perbandingan antar sub unit kerja

IKU Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat hanya ada di BPBL Lombok sehingga tidak bisa dibandingkan dengan UPT Laut lainnya.

Pada Triwulan I Tahun 2024 permasalahan yang dihadapi adalah kegiatan bantuan sarana dan prasarana ikan hias belum bisa dilaksanakan karena masih dalam tahap proses identifikasi dan verifikasi

Tindak lanjut Pada Triwulan berikutnya adalah melaksanakan kegiatan bantuan sarana dan prasarana ikan hias secara tepat waktu

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 :

Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan

10. Persentase layanan pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan

Kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji adalah suatu kegiatan pelayanan pengujian sampel oleh laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Lombok yang terdiri

dari pengujian kualitas air, patologi, mikrobiologi (non AMR), dan biologi molekuler.

Pada Triwulan sebelumnya terdapat permasalahan yaitu adanya beberapa temuan pada saat akreditasi laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.

Perbaikan yang sudah dilakukan adalah berkoordinasi dengan Tim Kerja Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan sehingga temuan-temuan tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Pada Triwulan I Tahun 2024 telah dilakukan penyusunan perencanaan Target pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan sebanyak 965 sampel sebagai berikut :

Tabel 33. Target pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan

No	Bulan	Ruang Lingkup				
		Kualitas Air	Patologi	Mikrobiologi	Biologi Molekuler	TOTAL
1	Januari	50	3	16	8	77
2	Februari	50	5	16	8	79
3	Maret	40	4	12	3	59
4	April	50	4	15	5	74
5	Mei	52	5	16	8	81
6	Juni	52	6	18	10	86
7	Juli	52	5	18	10	85
8	Agustus	52	5	18	10	85
9	September	55	5	18	10	88
10	Oktober	55	5	16	10	86
11	November	55	5	15	10	85
12	Desember	52	4	15	9	80
TOTAL		615	56	193	101	965

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Layanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pada Triwulan I Tahun 2024 ini BPBL telah menguji sebanyak 1090 sampel atau 112.95 % dari target sampel (965 sampel). Berikut ini adalah rincian jumlah sampel dan dokumentasi kegiatan pengambilan sampel :

Tabel 34. Realisasi Jumlah sampel yang diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

No	Bulan	Target	Ruang Lingkup Uji					Jumlah	Kumulatif	Prosentase
			Kualitas Air	Molekuler	Mikrobiologi	Parasit dan Patologi	Residu			
1	Januari	77	230	5	1	2	238	238	24.66	
2	Februari	79	457	39	5	5	506	744	77.10	
3	Maret	59	317	8	17	4	346	1090	112.95	



Gambar 13. Dokumentasi pengambilan sampel

IKU ini didukung pagu anggaran sebesar Rp 355.214.000 dimana pada Triwulan I Tahun 2024 ini telah terealisasi sebesar 180.100.776 atau 50,70% dari pagu yang digunakan untuk kegiatan sampel kualitas air, sampel patologi, dan sampel mikrobiologi.

Perbandingan dari waktu ke waktu

Pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan pada Triwulan I Tahun 2024 lebih tinggi 325.74% dari Triwulan I Tahun 2023. Berikut adalah Tabel Layanan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan :

Tabel 35. Prosentase layanan pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan

Nama SK :Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan						
Nama Indikator : Persentase layanan pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan						
Triwulan I Tahun 2024			Realisasi	Perbandingan	Target 2024	Realisasi
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2023	Realisasi Triwulan I Tahun 2024 thd Triwulan I Tahun		Target Tahunan (%)
20	112.95	564.75%	26.53	325.74	100	112.95%

Dari Tahun 2019, BPBL Lombok rutin melakukan pengujian sampel. Berikut adalah perkembangan pengujian sampel kesehatan ikan dan lingkungan sejak tahun 2019 :

Tabel 36. Perkembangan pengujian Sampel Kesehatan Ikan dan Lingkungan

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
1202	2164	3567	4162	206.9	100	-	0.00%

Perbandingan antar sub unit kerja

Jumlah prosentase capaian sampel yang diuji di BPBL Lombok capaiannya lebih tinggi dibandingkan BBPBL Lampung, BPBL Ambon dan BPBL Batam. Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 37. Perbandingan Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	100	112.95	112.95
BPBL Ambon	100	58.93	58.93
BPBL Batam	100	47.08	47.08
BBPBL Lampung	100	31.19	31.19

Pada Triwulan I Tahun 2024 ini terdapat permasalahan yaitu adanya kerusakan di beberapa titik gedung Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Tindak lanjut ke depannya adalah dianggarkan untuk dilakukan perbaikan di titik-titik tersebut.

11. Ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi (parameter)

Akreditasi Laboratorium ISO 17025 adalah standar terpenting untuk laboratorium pengujian dan / atau kalibrasi. Dengan adanya menegaskan bahwa laboratorium Anda mampu menghasilkan hasil pengujian dan data kalibrasi yang tepat dan akurat. Akreditasi ISO 17025 bertindak sebagai proses tinjauan pihak ketiga dalam hal ini KAN yang memberikan jaminan bahwa sistem manajemen mutu laboratorium mutakhir dan memiliki kompetensi teknis yang komprehensif. Standar ISO 17025 digunakan untuk memverifikasi kemampuan Laboratorium dalam menghasilkan data pengujian dan kalibrasi yang andal, termasuk penanganan dan pengangkutan item pengujian yang tepat.

Laboratorium penguji kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Lombok sudah terakreditasi ISO/IEC 17025 : 2017 hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan pada pelanggan dan juga Pelanggan merasa bahwa layanan tersebut dapat dipercaya karena diverifikasi oleh pihak ketiga. Selain itu, akreditasi memberikan jaminan bahwa organisasi atau laboratorium tertentu mematuhi standar kualitas yang disyaratkan secara internasional. Pada pada bulan Agustus tahun 2023 dilakukan survailance 1 dari KAN dan selanjutnya sesuai jadwal dari KAN pada bulan ke 36 akan dilakukan survailance ke 2. Direncanakan pada saat survailance ke 2 akan dilakukan penambahan ruang lingkup pengujian yaitu parameter EHP dengan metode RT.PCR, parameter kualitas air TSS dengan metode gravimetri dan Amoniak dengan metode spektrofotometer. Pada tahun 2024 dilakukan kegiatan maintenance akreditasi dan persiapan penambahan ruang lingkup diantaranya kalibrasi internal dan eksternal, uji banding, kaji ulang manajemen, audit internal, uji profisiensi dan kaji ulang dokumen.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I direncanakan dilakukan kalibrasi peralatan laboratorium yang masuk dalam ruang lingkup akreditasi, namun karena laboratorium kalibrasi yang ditentukan belum memberikan respon dan jadwal kalibrasi maka kalibrasi dilakukan pada triwulan II.

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 75.000.000 dimana pada Triwulan I Tahun 2024 belum ada realisasi dari kegiatan ini.

Perbandingan dari waktu ke waktu

IKU Ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi merupakan IKU yang baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan antar sub unit kerja

IKU Ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi belum ada capaiannya sama dengan BPBL Batam, BPBL Ambon, dan BBPBL Lampung.

Pada Triwulan I Tahun 2024 permasalahan yang dihadapi adalah bahwa telah direncanakan akan dilakukan kalibrasi peralatan laboratorium yang masuk dalam ruang lingkup akreditasi, namun karena laboratorium kalibrasi yang ditentukan belum memberikan respon dan jadwal kalibrasi maka kalibrasi dilakukan pada triwulan II.

Tindak lanjut Pada Triwulan II Tahun 2024 adalah melaksanakan koordinasi dengan laboratorium kalibrasi supaya dapat segera melakukan kalibrasi peralatan laboratorium.

12. **Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance**

Resistensi antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan. Pengendalian Resistansi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*) merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resistan.

Sesuai dengan INPRES No 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistansi Antimikroba (RAN PRA) Tahun 2020-2024, dimana KKP dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berkontribusi dalam pengendalian resistansi antimikroba pada sektor kesehatan ikan, salah satu strategi pada RAN PRA tahun 2020-2024 adalah peningkatan pengetahuan dan bukti ilmiah melalui surveilans dan penelitian.

Pengujian resistansi antimikroba oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok untuk mengetahui tingkat resistansi mikroba akibat penggunaan antimikroba, dimana semakin kecil tingkat resistansi mikroba, semakin bagus pengendalian resistansi antimikrobanya.

Pada Triwulan sebelumnya terdapat permasalahan yaitu adanya beberapa temuan pada

saat akreditasi laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.

Perbaikan yang sudah dilakukan adalah berkoordinasi dengan Tim Kerja Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan sehingga temuan-temuan tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Pada Triwulan I Tahun 2024 telah dilakukan penyusunan perencanaan Target pengujian sampel AMR sebanyak 35 sampel sebagai berikut :

Tabel 38. Target Jumlah sampel AMR

Target	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TOTAL TARGET
AMR	0	3	3	2	3	3	4	4	4	3	3	3	35

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2024 ini BPBL telah menguji sebanyak 16 sampel atau 5.71 % dari target sampel (35 sampel). Berikut ini adalah rincian jumlah sampel dan dokumentasi kegiatan pengambilan sampel :

Tabel 39. Realisasi Jumlah sampel AMR

No.	Bulan	Target	Ruang Lingkup Uji	Jumlah	Kumulatif	Prosentase
			AMR			
1	Januari	0	0	0	0	0
2	Februari	3	14	14	14	40
3	Maret	3	2	2	16	45.71





Gambar 14. Dokumentasi pengambilan sampel AMR

IKU ini didukung pagu anggaran sebesar Rp 31.075.000 dimana pada Triwulan I Tahun 2024 ini telah terealisasi sebesar 17.705.280 atau 56,98% dari pagu yang digunakan untuk Perencanaan dan persiapan serta pelaksanaan.

Perbandingan dari waktu ke waktu

IKU Persentase pengujian sampel antimikrobal resistance (AMR) naik sebesar 79,32 % jika dibandingkan dengan IKU capaian sampel tersebut pada Triwulan I Tahun 2023. adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 40. Persentase pengujian AMR

Nama SK :Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan						
Nama Indikator : Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR)						
Triwulan I Tahun 2024			Realisasi	Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2024 thd Triwulan I Tahun 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2023			
15	45.71	304.73%	25.49	79.32	100	45.71%

Dari Tahun 2019, BPBL Lombok rutin melakukan pengujian AMR. Berikut adalah perkembangan pengujian AMR sejak tahun 2019 :

Tabel 41. Perkembangan pengujian sampel AMR

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
-	-	-	83	101.96	100	45.71	45.71%

Perbandingan antar sub unit kerja

Jumlah prosentase capaian sampel yang diuji di BPBL Lombok capaiannya lebih tinggi dibandingkan BBPBL Lampung, BPBL Ambon dan BPBL Batam. Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 42. Perbandingan Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji

UPT	Target (%)	Realisasi (%)	Prosentase
BPBL Lombok	100	45.71	45.71
BPBL Ambon	100	34.29	34.29
BPBL Batam	100	26.4	26.40
BBPBL Lampung	100	25.42	25.42

Pada Triwulan I Tahun 2024 ini terdapat permasalahan yaitu adanya kerusakan di beberapa titik gedung Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Tindak lanjut ke depannya adalah dianggarkan untuk dilakukan perbaikan di titik-titik tersebut.

13. Indeks profesionalitas ASN lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu :

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS,
2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi

berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis;

3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

Pada Triwulan sebelumnya permasalahan yang terjadi adalah masih ditemukan banyak pegawai yang telah mengikuti Bimtek maupun pelatihan lainnya belum mengupdate data Kursus di e-pegawai namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan menginstruksikan seluruh pegawai untuk memasukkan sertifikat ke aplikasi *e-SKP* BKN

Tindak lanjut yang telah dilakukan adalah meningkatkan kompetensi pegawai melalui diklat atau bimtek baik secara daring/luring.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I ini belum dilakukan penghitungan capaian IP ASN dari target sebesar 85, namun para pegawai BPBL Lombok sudah diinstruksikan untuk upload ke e-pegawai apabila telah mengikuti bimtek/seminar.

Perbandingan dari waktu ke waktu

Adapun dari Tahun 2019, DJPB telah menargetkan IKU IP ASN di UPT. Berikut adalah perkembangan nilai IP ASN BPBL Lombok sejak tahun 2019 :

Tabel 43. perkembangan IP ASN BPBL Lombok

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
76.2	80.25	74.02	84.74	88.04	85	0	0.00%

Perbandingan antar sub unit kerja

Indeks profesionalitas ASN lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok capaiannya sama dengan BPBL Batam, BPBL Ambon, dan BBPBL Lampung yaitu belum ada capaian pada Triwulan I Tahun 2024.

Permasalahan yang terjadi pada Triwulan I Tahun 2024 ini adalah adanya perpindahan link untuk *upload* sertifikat dari www.epegawai.kkp.go.id ke www.siasn.bkn.go.id karena adanya integrasi layanan data di Badan Kepegawaian Negara.

Tindak lanjut pada Triwulan berikutnya adalah menginformasikan kepada seluruh pegawai BPBL Lombok untuk *upload* dan/atau *update* data sertifikat ke link yang terbaru.

14. IKU Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Unit Kerja yang berpredikat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan pelayanan publik.

permasalahan yang terjadi pada Tahun lalu adalah proses pengumpulan dokumen dan data dukung membutuhkan waktu yang cukup lama dan perlunya konsistensi dari Ketua tim dan anggota untuk tetap melakukan pengumpulan dokumen yang bersifat rutin

Perbaikan yang telah dilakukan adalah melakukan interaksi yang lebih intens melalui rapat-rapat internal yang diagendakan dilakukan secara bulanan sebagai wadah komunikasi untuk mewujudkan Zona Integritas.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I ini belum dilakukan penghitungan penilaian pembangunan ZI menuju WBK di satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok karena capaian di akhir tahun.

Perbandingan dari waktu ke waktu

Adapun dari Tahun 2019, BPBL Lombok baru memperoleh predikat pembangunan ZI menuju WBK di Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok pada Tahun 2022 :

Tabel 44. Perkembangan predikat pembangunan ZI menuju WBK

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
-	-	-	82.20	82.20	76		0.00%

Perbandingan antar sub unit kerja

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Permasalahan yang terjadi pada Triwulan I Tahun 2024 ini adalah adanya perpindahan kepala balai dan juga kasubbag umum yang menjadi ketua tim ZI WBK tahun 2023 yang menyebabkan terjadinya perubahan anggota dalam tim ZI WBK.

Tindak lanjut ke depannya adalah koordinasi dengan tim ZI WBK yang baru terkait dengan tanggung jawab tiap area .

15. IKU Prosentase Penyelesaian LHP BPK Satker BPBL Lombok

Prosentase penyelesaian LHP BPK BPBL Lombok merupakan penghitungan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan/ LHP BPK yang dilaksanakan di BPBL Lombok sebagai bentuk komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas yang dapat berpengaruh pada persepsi laporan keuangan BPBL Lombok.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I ini belum dilakukan penghitungan Prosentase Penyelesaian LHP BPK Satker BPBL Lombok karena capaian di akhir tahun.

Perbandingan dari waktu ke waktu

Adapun dari Tahun 2019, DJPB telah menargetkan IKU Prosentase penyelesaian LHP BPK BPBL Lombok di UPT. Berikut adalah perkembangan Prosentase penyelesaian LHP BPK BPBL Lombok sejak tahun 2019 :

Tabel 45. Perkembangan prosentase penyelesaian LHP BPK

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
0.02	82	100	100	100	100	0	0.00%

Perbandingan antar sub unit kerja

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Pada Triwulan I ini belum ada LHP BPK yang harus diselesaikan, meskipun demikian tindak lanjut ke depannya adalah melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

16. IKU Nilai PM SAKIP Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penilaian PM SAKIP yang dilakukan melalui LKE Inspektorat Jenderal dengan tujuan agar pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntabilitas dan peraturan yang ada

Nilai PM SAKIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

Nilai PM SAKIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 5 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian kinerja (20%).

Pada Tahun 2023 permasalahan yang terjadi adalah adanya perubahan indikator kinerja pada perjanjian kerja dan juga perubahan kepala tim kerja BPBL Lombok, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada Dokumen SAKIP BPBL Lombok.

Perbaikan yang sudah dilakukan adalah selalu memperbarui dokumen-dokumen yang diperlukan dan juga telah disusun perencanaan kinerja Tahun 2024.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2023 ini belum dilakukan penghitungan nilai PM SAKIP BPBL Lombok karena capaian di akhir tahun.

Perbandingan dari waktu ke waktu

Adapun sejak Tahun 2019, telah dilakukan penilaian kinerja BPBL Lombok dimana sejak Tahun 2023 ini metode perhitungannya berubah. Berikut adalah perkembangan penilaian SAKIP BPBL Lombok sejak tahun 2019 :

Tabel 46. perkembangan PM SAKIP BPBL Lombok

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
100	89.63	96.7	96.74	78.5	82	0	0.00%

Perbandingan antar sub unit kerja

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada IKU ini dan permasalahan pada Triwulan I Tahun 2024 ini adalah adanya perubahan kepala balai sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan perubahan beberapa dokumen di perencanaan kinerja BPBL Lombok.

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah memperbarui dokumen-dokumen yang diperlukan.

17. IKU Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)

Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPBL Lombok adalah prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan di BPBL Lombok yang telah ditindaklanjuti dengan status tuntas. Cara perhitungan ini adalah dokumen yang tindak lanjutnya telah tuntas diselesaikan dibandingkan dengan jumlah temuan hasil pengawasan.

Permasalahan pada Triwulan I Tahun 2023 adalah sempat ada 1 (satu) tindak lanjut atas rekomendasi itjen yang belum terselesaikan namun bisa terselesaikan pada akhir tahun.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan surat dari sesditjen perikanan budidaya nomor B.2517/DJPB.1/HP.620/I/2024 tanggal 16 April 2024 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB” Triwulan I Tahun 2024, nilai BPBL Lombok sebesar 100% dari target 80%.

Perbandingan dari waktu ke waktu

Adapun sejak Tahun 2019, IKU Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok baru dilakukan penilaian pada Tahun 2020. Berikut adalah perkembangan Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sejak tahun 2019 :

Tabel 47. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
-	100	90.57	100	100	80	100	125.00%

Perbandingan antar sub unit kerja

Berikut adalah tabel perbandingan Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT DJPB

Tabel 48.. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT DJPB

No	Unit Kerja	Capaian IKU
1	Setditjen Perikanan Budi Daya	100,00%
2	Direktorat Perbenihan	90,00%
3	Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	82,61%
4	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	100,00%
5	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	100,00%
6	BBPBAT Sukabumi	100,00%
7	BBPBL Lampung	88,00%
8	BBPBAP Jepara	95,12%
9	BPBAP Situbondo	83,87%
10	BPBAP Ujung Batee	94,44%
11	BPBAP Takalar	90,91%
12	BPBAT Tatelu	100,00%
13	BPBAT Sungai Gelam Jambi	80,00%
14	BPBAT Mandiangin	100,00%
15	BPBL Ambon	100,00%
16	BPBL Lombok	100,00%
17	BPBL Batam	100,00%
18	BLUPPB Karawang	100,00%
19	BPIUUK Karangasem	100,00%
20	BPKIL Serang	100,00%

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan pada Triwulan I Tahun 2024 permasalahan yang terjadi adalah adanya pemeriksaan itjen pada 1 Maret 2024 dimana ada 25 temuan yang harus diselesaikan

18. IKU Nilai IKPA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%);

Nilai IKPA adalah Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 8 (delapan) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Devisiasi RDP, Penyerapan anggaran, belanja kontraktual, Penyelesaian Tagihan, pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.

Pada triwulan sebelumnya permasalahan yang terjadi adalah masih rendahnya nilai deviasi Hal III DIPA dan Nilai penyerapan anggaran sehingga menyebabkan nilai IKPA BPBL Lombok tidak mencapai target.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan I Tahun 2024 ini adalah melakukan koordinasi antara PPK, perencana dan tim keuangan supaya deviasi hal III DIPA BPBL Lombok tidak terlalu tinggi.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2023 ini belum dilakukan penghitungan nilai IKPA BPBL Lombok karena capaian di akhir tahun.

Perbandingan dari waktu ke waktu

Adapun sejak Tahun 2019, telah dilakukan penilaian IKPA BPBL Lombok. Berikut adalah perkembangan penilaian IKPA BPBL Lombok sejak tahun 2019 :

Tabel 49. Perkembangan nilai IKPA BPBL Lombok

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
98.06	94.44	95.72	95.01	91.83	93.76	0	0.00%

Perbandingan antar sub unit kerja

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada IKU ini dan permasalahan pada Triwulan I Tahun 2024 ini nilai deviasi Hal III DIPA BPBL Lombok yang masih rendah.

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah koordinasi yang intensif antara PPK, Perencana dan bagian keuangan.

19. IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker BPBL Lombok (%)

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya yang perhitungannya diperoleh melalui aplikasi SMART DJA.

Pada aplikasi SMART DJA, pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk

menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2024 ini belum dilakukan penghitungan Nilai Kinerja Anggaran BPBL Lombok karena capaian di akhir tahun.

Perbandingan dari waktu ke waktu

Adapun sejak Tahun 2019, IKU NKA BPBL Lombok mulai rutin diperhitungkan. Berikut adalah perkembangan IKU NKA sejak tahun 2019 :

Tabel 50. Nilai Kinerja Anggaran BPBL Lombok

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
-	96.86	88	88.70	87.39	86	0	0.00%

Perbandingan antar sub unit kerja

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan pengisian SMART hingga saat ini masih terintegrasi dengan aplikasi SAKTI sehingga dibutuhkan berkoordinasi dengan operator komitmen dalam hal pengisian capaian output aplikasi SAKTI.

20. IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa (%);

IKU tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPBL Lombok yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan PBJ BPBL Lombok diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Manajemen Risiko PBJ Strategis (5%)
2. Aktivitas Pengendalian telah dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun (5%)
3. Paket pengadaan melalui penyedia yang telah diumumkan dalam SIRUP (5%)
4. Ketersediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian (5%)
5. HPS pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan (5%)
6. Pemilihan penyedia barang/Jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang dilaksanakan melalui SPSE (10%)
- 7) Jumlah pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang telah dikontrakkan (Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa) (11,25%)
- 8) Kesesuaian waktu penyelesaian pengadaan barang/jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%)
- 9) Kesesuaian kuantitas (jumlah/volume) pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%)
- 10) Kesesuaian spesifikasi pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%)
- 11) Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan PBJ (5%)
- 12) Hasil pengawasan Inspektorat Mitra terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa ditindaklanjuti oleh Unit yang bersangkutan (15%)
- 13) Persentase besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa (TKDN)

Pada Tahun 2023 permasalahan yang terjadi adalah adanya penambahan bantuan sarana dan prasarana bioflok pada akhir tahun namun BPBL lombok telah melakukan proses pengadaan sebelum akhir tahun.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2024 ini belum dilakukan penghitungan Nilai Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa karena capaian di akhir tahun.

Perbandingan dari waktu ke waktu

Adapun sejak Tahun 2019, IKU Tingkat Kepatuhan PBJ ini baru mulai ada pada Tahun 2021. Berikut adalah perkembangan Tingkat kepatuhan PBJ sejak tahun 2019 :

Tabel 51. Perkembangan Tingkat Kepatuhan PBJ

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
-	-	73.25	76.63	82.25	80	0	0.00%

Perbandingan antar sub unit kerja

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan permasalahan pada Triwulan I Tahun 2024 adalah adanya peraturan terbaru dimana kegiatan PBJ seharusnya dilaksanakan oleh JFT PBJ, namun saat ini masih diijinkan karena ada relaksasi dri LKPP yang menyatakan bahwa satker yang tidak memiliki fungsional PBJ maka bisa dirangkap dengan pegawai fungsional lainnya yang memiliki sertifikat PBJ Level 1 dan kompetensi level 1.

Tindak lanjut pada Triwulan berikutnya adalah menugaskan pegawai untuk mengikuti uji kompetensi PBJ

21. IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Satker BPBL Lombok (%);

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BPBL Lombok yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (25%).
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN (15%).
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat (15%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2021 (20%)
5. Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (25%).

permasalahan pada Tahun 2023 adalah berkas masih sedang diproses oleh eselon I DJPB, dan perbaikan yang sudah dilakukan adalah koordinasi dengan eselon I DJPB terkait berkas PSP dan penghapusan BPBL Lombok.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2024 ini belum dilakukan penghitungan Nilai Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara karena capaian di akhir tahun.

Perbandingan dari waktu ke waktu

Adapun sejak Tahun 2019, IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN ini baru mulai ada pada Tahun 2021. Berikut adalah perkembangan Tingkat kepatuhan BMN sejak tahun 2019 :

Tabel 52. Perkembangan Tingkat kepatuhan BMN

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
-	-	77.5	76.50		80	0	0.00%

- **Perbandingan antar sub unit kerja**

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan permasalahan pada Triwulan I Tahun 2024 adalah belum dilakukan PSP

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah mengajukan usulan PSP.

22. IKU Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA (%)

Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA, merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar di database KUSUKA dengan status submit valid dan revisi. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/updating data pelaku usaha budidaya ikan. Pendataan KUSUKA dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2023, dengan baseline data hasil pendataan terakhir tahun 2022 (31 Desember 2022).

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2024 ini belum dilakukan penghitungan Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA karena capaian di akhir tahun.

Perbandingan dari waktu ke waktu

Adapun sejak Tahun 2019, IKU Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA ini baru mulai ada pada Tahun 2021. Berikut adalah perkembangan Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA sejak tahun 2019 :

Tabel 53. Perkembangan pelaku usaha budidaya yang terintegrasi KUSUKA

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
-	-	77.5	76.50	85.26	80	0	0.00%

Perbandingan antar sub unit kerja

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan permasalahan pada Triwulan I Tahun 2023 ini adalah proses verifikasi yang cukup lama dan masih seringnya aplikasi mengalami error sehingga tindak lanjut ke depannya adalah berkoordinasi dengan TIM DJPB dan PUSDATIN terkait kendala pada Aplikasi KUSUKA.

23. IKU Indeks pengelolaan kepegawaian

IKU indeks Pengelolaan pegawai adalah proses pengelolaan pegawai mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi pegawai lingkup BPBL Lombok. Proses tersebut dibagi dalam 3 (tiga) rumpun, yaitu : (1) proses Mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CANS, pengangkatan CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengangkatan pertama dalam jabatan, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses

peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (2) proses ketatausahaan, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan atau sanksi, dan (3) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN. Indeks pengelolaan kepegawaian merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan pegawai, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam standar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan pada Tahun 2023 adalah bahwa sempat dalam aplikasi e-Kinerja BKN kepala balai yang lama masih teregister sebagai kepala balai BPBL Lombok namun hal tersebut dapat terselesaikan dengan dengan koordinasi dengan bagian SDMAO DJPB.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2024 ini belum dilakukan penghitungan Indeks pengelolaan Kepegawaian karena capaian di akhir tahun.

Perbandingan dari waktu ke waktu

Adapun sejak Tahun 2019, IKU ini baru mulai ada pada Tahun 2023. Berikut adalah perkembangan Indeks pengelolaan Kepegawaian sejak tahun 2019 :

Tabel 54. Perkembangan indeks pengelolaan kepegawaian

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
-	-	77.5	76.50	133.33	4	0	0.00%

Perbandingan antar sub unit kerja

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan Permasalahan pada Triwulan I Tahun 2024 adalah bahwa nama plt kepala balai Perikanan Budidaya Laut Lombok I aplikasi ekinerja BKN masih nama kepala balai yang lama, sehingga tindak lanjut atas permasalahan tersebut adalah berkonsultasi dengan bagian SDMAO DJPB untuk perbaikan profil kepala balai yang baru.

24. IKU Nilai Pengawasan kearsipan ;

Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Permasalahan pada Tahun 2023 adalah nilai pengawasan arsip yang belum mencapai target.

Perbaikan yang sudah dilakukan adalah meningkatkan pengelolaan kearsipan di BPBL Lombok supaya nilai kearsipan bisa mencapai target.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2024 ini belum dilakukan penilaian pengawasan kearsipan karena capaian di akhir tahun.

Perbandingan dari waktu ke waktu

Sejak Tahun 2019, IKU Nilai pengawasan kearsipan BPBL Lombok baru mulai dihitung pada Tahun 2022. Berikut adalah perkembangan IKU Nilai Pengawasan kearsipan sejak tahun 2019 :

Tabel 55. Perkembangan nilai pengawasan kearsipan

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022		target	realisasi	% capaian
-	-		56.43	74.25	75	0	0.00%

Perbandingan antar sub unit kerja

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan permasalahan pada

Triwulan I Tahun 2024 adalah akan dilakukannya pra penilaian pengawasan kearsipan di akhir April

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah menyiapkan data dukung yang diperlukan untuk persiapan pra penilaian pengawasan kearsipan.

25. IKU Persentase Layanan Perkantoran BPBL Lombok;

Persentase layanan perkantoran pusat merupakan kualitas layanan perkantoran di satker BPBL Lombok dimana IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada Tahun 2024.

Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan I Tahun 2024 ini belum dilakukan perhitungan prosentase layanan perkantoran karena capaian di akhir tahun.

Perbandingan dari waktu ke waktu

IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

Perbandingan antar sub unit kerja

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan permasalahan pada Triwulan I Tahun 2024 adalah akan adanya kerusakan di beberapa titik gedung Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah dilakukan perbaikan di titik-titik tersebut dalam rangka pelayanan kantor BPBL Lombok.

3.2. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dalam membiayai program peningkatan produksi perikanan budidaya laut mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 25.088.141.000 (Dua Puluh Lima Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Satu ribu rupiah) dan dari dana yang dialokasikan tersebut, sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp 3.017.542.743 atau 12,03% dari pagu.

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER	
1	567762 BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	PAGU	7,489,600,000	16,512,895,000	1,085,646,000	0	0	0	0	0	0	25,088,141,000
		REALISASI	1,278,411,250 (17.07%)	1,625,800,093 (9.85%)	113,331,400 (10.44%)	0	0	0	0	0	0	3,017,542,743 (12.03%)
		SISA	6,211,188,750	14,887,094,907	972,314,600	0	0	0	0	0	0	22,070,598,257
GRAND TOTAL		PAGU	7,489,600,000	16,512,895,000	1,085,646,000	0	0	0	0	0	0	25,088,141,000
		REALISASI	1,278,411,250 (17.07%)	1,625,800,093 (9.85%)	113,331,400 (10.44%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	3,017,542,743 (12.03%)
		SISA	6,211,188,750	14,887,094,907	972,314,600	0	0	0	0	0	0	22,070,598,257

Gambar 15. Screenshot aplikasi OMSPAN

3.3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Pada Triwulan I Tahun 2024 ini belum bisa dilihat hasil efisiensi di aplikasi SMART DJA.

BAB 4. PENUTUP

Laporan Kinerja BPBL Lombok Triwulan I Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Pada Triwulan I Tahun 2024, hasil pengukuran dan analisa yang dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada seluruh indikator-indikator utama (IKU) yang menjadi target BPBL Lombok didapatkan hasil dari total 25 IKU, sebanyak 7 indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, dalam mempercepat dan meningkatkan kinerja BPBL Lombok di tahun-tahun kedepan beberapa upaya-upaya konkrit yang dapat dilakukan, antara lain: (i) meningkatkan koordinasi antara PPK, Perencana dan bagian keuangan; (ii) mengajukan kebutuhan akan jabatan arsiparis di BPBL Lombok dan (iv) menunjuk beberapa orang untuk mengelola media sosial BPBL Lombok sehingga engan keaktifan media sosial balai dapat meningkatkan pelayanan di BPBL Lombok.

Akhirnya, Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian-capaian output dari IKU yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) antara Dirjen Perikanan Budidaya dan Kepala BPBL Lombok. Lebih lanjut lagi, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan/ input dalam merumuskan kebijakan baik di level UPT maupun di tingkatan yang lebih tinggi (level pusat) di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) BPBL Lombok Triwulan I Tahun 2024 ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Wawan Cahyono Ashuri**
Jabatan : Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut
Lombok

Wawan Cahyono Ashuri

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	1.	Nilai PNBP Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Rupiah)	781.085.000
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	2.	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		3.	Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		4.	Calon Induk Unggul Ikan Laut yang Diproduksi (Ekor)	3.476
		5.	Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		6.	Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) Yang Disalurkan Ke Masyarakat (Persen)	75
		7.	Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar yang Dimanfaatkan (Persen)	100
		8.	Persentase Diseminasi Teknologi Budi Daya Ikan (Persen)	100
		9.	Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang Disalurkan (Persen)	100
		3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang	10.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Kawasan dan Kesehatan Ikan	11.	Ruang Lingkup Laboratorium yang Terakreditasi (Parameter)	7
		12.	Persentase Pengujian Antimikrobia Resistance (AMR) (Persen)	100
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	13.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Lombok (Persen)	85
		14.	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
		15.	Prosentase Penyelesaian LHP BPK Atas Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Persen)	100
		16.	Nilai PM SAKIP Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Nilai)	82
		17.	Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Persen)	80
		18.	Nilai IKPA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Nilai)	93,76
		19.	NKA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Nilai)	86
		20.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Nilai)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		21. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Nilai)	80
		22. Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budidaya yang Terintegrasi dengan Data KUSUKA (Persen)	80
		23. Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4
		24. Nilai Pengawasan kearsipan (Nilai)	75
		25. Persentase Layanan Perkantoran BPBL Lombok (Persen)	80

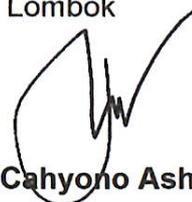
Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok



Wawan Cahyono Ashuri

DATA ANGGARAN :

NO	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Perbenihan Ikan	3.846.476.000
2.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	461.289.000
3.	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	12.150.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	12.140.089.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok Tahun 2024		28.597.854.000

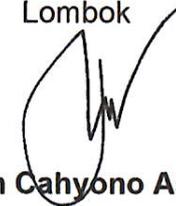
Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok



Wawan Cahyono Ashuri

LAMPIRAN 2

DATA DUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.2528/DJPB.1/KU.340/IV/2024 16 April 2024
Sifat : -
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Capaian Realisasi PNBPN Lingkup DJPB
Triwulan I Tahun 2024

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan I Tahun 2024, bersama ini disampaikan Capaian Realisasi PNBPN Lingkup DJPB Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Diperoleh dari jumlah Pendapatan Fungsional dan Umum Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak UPT dan BLU DJPB periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Maret 2024 (Triwulan I 2024).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak UPT dan BLU DJPB pada periode pengukuran hingga periode Triwulan I Tahun 2024 lingkup DJPB sebesar **9,35%** (sebesar **Rp. 4.674.132.326** dari target PNBPN DJPB sebesar **Rp. 49.985.496.000**).
3. Rincian capaian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari masing-masing UPT dan BLU DJPB disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

Tembusan :
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Lampiran Surat Dinas

Nomor : B.2528/DJPB.1/KU.340/IV/2024

Tanggal : 16 April 2024

DAFTAR NAMA PEJABAT PENERIMA SURAT

1. Kepala BLU Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
2. Plh. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
3. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
4. Kepala BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
5. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
6. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
7. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
8. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
9. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
10. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
11. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
12. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam
13. Kepala BLU Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang
14. Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekekangan Karangasem
15. Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

No.	KODE SATKER	NAMA SATUAN KERJA	TARGET SESUAI PK	REALISASI S/D CAPAIAN IKU	% SESUAI PK	S / D BULAN
1	2	3	4	5	6	7
		REALISASI PENDAPATAN PNBP				
1	632462	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Pusat)	Rp 50.000.000	Rp 152.494.486	304,99	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 50.000.000	Rp 56.499.999	113,00	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 95.994.487		
2	445393	BLU Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	Rp 27.358.090.000	Rp 428.100.841	1,56	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 27.358.090.000	Rp 126.263.491	1,56	
	II	Pendapatan Badan Layanan Umum		Rp 295.756.070		
	III	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 6.081.280		
3	239192	BLU Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	Rp 4.500.400.000	Rp 469.236.198	10,43	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 4.500.400.000	Rp 23.558.058	10,28	
	II	Pendapatan Badan Layanan Umum		Rp 439.054.506		
	III	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 6.623.634		
4	238734	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	Rp 1.590.081.000	Rp 323.516.841	20,35	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.590.081.000	Rp 313.905.511	19,74	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 9.611.330		
5	427706	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	Rp 1.189.308.000	Rp 204.519.850	17,20	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.189.308.000	Rp 204.502.659	17,20	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 17.191		
6	567350	BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	Rp 3.552.374.000	Rp 530.693.024	14,94	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 3.552.374.000	Rp 10.519.000	14,36	
	II	Pendapatan Badan Layanan Umum		Rp 499.583.163		
	III	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 20.590.861		
7	237657	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi	Rp 1.555.000.000	Rp 217.718.300	14,00	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.555.000.000	Rp 177.996.000	11,45	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 39.722.300		
8	567680	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	Rp 1.683.158.000	Rp 353.660.042	21,01	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.683.158.000	Rp 353.660.042	21,01	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp -		

9	567385	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee	Rp 1.232.517.000	Rp 303.540.101	24,63	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.232.517.000	Rp 302.541.388	24,55	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 998.713		
10	567474	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	Rp 1.274.795.000	Rp 232.912.625	18,27	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.274.795.000	Rp 231.744.015	18,18	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 1.168.610		
11	567584	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	Rp 1.214.288.000	Rp 336.480.069	27,71	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.214.288.000	Rp 336.480.069	27,71	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp -		
12	538911	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu	Rp 1.212.600.000	Rp 103.429.321	8,53	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.212.600.000	Rp 101.369.694	8,36	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 2.059.627		
13	567720	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Rp 968.400.000	Rp 169.655.009	17,52	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 968.400.000	Rp 157.915.445	16,31	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 11.739.564		
14	567762	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Rp 781.085.000	Rp 368.765.482	47,21	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 781.085.000	Rp 201.370.232	25,78	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 167.395.250		
15	567800	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	Rp 1.100.000.000	Rp 295.242.070	26,84	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.100.000.000	Rp 295.242.070	26,84	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp -		
16	445394	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekeurangan Karangasem	Rp 723.400.000	Rp 184.168.067	25,46	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 723.400.000	Rp 183.664.597	25,39	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 503.470		
		JUMLAH PENDAPATAN FUNGSIONAL + UMUM (I)	Rp 49.985.496.000	Rp 3.077.232.270	8,63	
		JUMLAH PENDAPATAN BLU (II)		Rp 1.234.393.739		
		JUMLAH NON ANGGARAN (III)	Rp -	Rp 362.506.317		
		JUMLAH PENDAPATAN I + II + III	Rp 49.985.496.000	Rp 4.674.132.326		9,35

Capaian Realisasi Bantuan Benih Triwulan I Tahun 2024
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

I. TARGET BANTUAN BENIH BPBL LOMBOK

343.435 ekor

II. CAPAIAN BANTUAN BENIH BPBL LOMBOK

Bulan	Jumlah Bantuan Benih	Jumlah Kumulatif Bantuan Benih	Prosentase capaian bantuan benih
Januari	48,000	48,000	13.98%
Februari	-	48,000	13.98%
Maret	25,000	73,000	21.26%



Lombok Barat, 3 April 2024

Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi

No	Jenis Bantuan	Penerima	Nama Kelompok	Provinsi	Kab/Kota	Ukuran	Tanggal Distribusi	Komoditas	Jumlah Benih (ekor)	Keterangan BAST	SK Penerima
									73,000		

REALISASI BANTUAN BENIH BPBL LOMBOK TAHUN 2024

Bulan Januari - 2024

1	Bantuan benih ikan	Nus Absalom Adu	POKDAKAN Ita Esa	NTT	Kupang	4-5 cm	16 Januari 2024	Kakap Putih	4,000	No. B.136/BPBL-L/PB.140/I/2024	No. B.116/BPBL-L/PB.150/BB/I/2024
2	Bantuan benih ikan	Karel Ferdinan Balle	POKDAKAN KUB Imanuel	NTT	Kupang	4-5 cm	16 Januari 2024	Kakap Putih	4,000	No. B.137/BPBL-L/PB.140/I/2024	No. B.116/BPBL-L/PB.150/BB/I/2024
3	Bantuan benih ikan	Joni Rassa	POKDAKAN KUB Kapala Batu	NTT	Kupang	4-5 cm	16 Januari 2024	Kakap Putih	4,000	No. B.138/BPBL-L/PB.140/I/2024	No. B.116/BPBL-L/PB.150/BB/I/2024
4	Bantuan benih ikan	Amadin Al Gazali Karudin	POKDAKAN 96 Fish	NTT	Kupang	4-5 cm	16 Januari 2024	Kakap Putih	4,000	No. B.139/BPBL-L/PB.140/I/2024	No. B.116/BPBL-L/PB.150/BB/I/2024
5	Bantuan benih ikan	Asri	POKDAKAN So Ati	NTB	Bima	4-5 cm	18 Januari 2024	Kakap Putih	8,000	No. B.171/BPBL-L/PB.140/I/2024	No. B.116/BPBL-L/PB.150/BB/I/2024
6	Bantuan benih ikan	Herimansyah	POKDAKAN So Nau Hill	NTB	Bima	4-5 cm	18 Januari 2024	Kakap Putih	8,000	No. B.172/BPBL-L/PB.140/I/2024	No. B.116/BPBL-L/PB.150/BB/I/2024
7	Bantuan benih ikan	Adhar	POKDAKAN KJA Bonto	NTB	Bima	4-5 cm	18 Januari 2024	Kakap Putih	8,000	No. B.173/BPBL-L/PB.140/I/2024	No. B.116/BPBL-L/PB.150/BB/I/2024
8	Bantuan benih ikan	Nurdin	KUB Usaha Bersama	NTB	Bima	4-5 cm	18 Januari 2024	Kakap Putih	8,000	No. B.174/BPBL-L/PB.140/I/2024	No. B.116/BPBL-L/PB.150/BB/I/2024

Bulan Februari - 2024

NIHIL

Bulan Maret - 2024

1	Bantuan benih ikan	Lalu Sukri	POKDAKAN Beriuk Ures	NTB	Lombok Barat	4-5 cm	26 Maret 2024	Kakap Putih	12,500	No. B.852/BPBL-L/PB.140/III/2024	No. B.753/BPBL-L/PB.140/III/2024
2	Bantuan benih ikan	Herwin Aminudin	POKDAKAN Bangun Bersama	NTB	Lombok Barat	4-5 cm	26 Maret 2024	Kakap Putih	12,500	No. B.853/BPBL-L/PB.140/III/2024	No. B.753/BPBL-L/PB.140/III/2024

Lombok Barat, 3 April 2024



Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi.,M.Pi

Capaian Realisasi Bantuan Bibit Rumput Laut Triwulan I Tahun 2024
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

I. **TARGET BANTUAN BIBIT RUMPUT LAUT BPBL LOMBOK**
5.000 Unit

II. **CAPAIAN BANTUAN BIBIT RUMPUT LAUT BPBL LOMBOK**

Bulan	Jumlah Bantuan Bibit Rumput Laut	Jumlah Kumulatif Bantuan Bibit Rumput Laut	Prosentase capaian bantuan bibit Rumput Laut
Januari	-	-	0.00%
Februari	1,000	1,000	20.00%
Maret	-	1,000	20.00%



Lombok Barat, 3 April 2024

Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi

REKAPITULASI DISTRIBUSI BANTUAN PEMERINTAH
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK, TA. 2024

NO	Nama Bantuan Pemerintah	Jumlah	Satuan Jumlah	Kelompok Penerima		Alamat				No BAST	Tanggal BAST
				Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi		
1	Bantuan Bibit Rumput Laut	1,000	Kg	Usuroda Makmur	La Bju	Wisata Kolo	Wangi - wangi selatan	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	B.585/BPBL- L/PB.150/II/2024	28 Februari 2024

Lombok Barat, 3 April 2024



Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi.,M.Pi

DATA DUKUNG DISEMINASI TEKNOLOGI TAHUN 2024

No	LOKASI DISEMINASI TEKNOLOGI	DOKUMENTASI
1.	Kab.Sikka, Nusa Tenggara Timur	
2.	Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat	
3.	Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat	

Lombok Barat, 18 April 2024
 Plt. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
 Wawan Cahyono Ashuri



**Capaian Realisasi Sampel Lab Keskanling Triwulan I Tahun 2024
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok**

I. TARGET SAMPEL LAB KESKANLING BPBL LOMBOK
965 sampel

II. CAPAIAN SAMPEL LAB KESKANLING BPBL LOMBOK

No.	Bulan	Target	Ruang Lingkup Uji					Jumlah	Kumulatif	Prosentase
			Kualitas Air	Molekuler	Mikrobiologi	Parasit dan Patologi	Residu			
1	Januari	77	230	5	1	2		238	238	24.66
2	Februari	79	457	39	5	5		506	744	77.10
3	Maret	59	317	8	17	4		346	1090	112.95
4	April	74						0		
5	Mei	81						0		
6	Juni	86						0		
7	Juli	85						0		
8	Agustus	85						0		
9	September	88						0		
10	Oktober	86						0		
11	November	85						0		
12	Desember	80						0		
TOTAL		965	1004	52	23	11	0	1090		112.95

Lombok Barat, 3 April 2024

Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi., M.Pi.



Capaian Realisasi Sampel Lab AMR Triwulan I Tahun 2024
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

I. TARGET SAMPEL AMR BPBL LOMBOK
35 sampel

II. CAPAIAN SAMPEL AMR BPBL LOMBOK

No.	Bulan	Target	Ruang Lingkup Uji	Jumlah	Kumulatif	Prosentase
			AMR			
1	Januari	0	0	0	0	0
2	Februari	3	14	14	14	40
3	Maret	3	2	2	16	45.71
4	April	2				
5	Mei	3				
6	Juni	3				
7	Juli	4				
8	Agustus	4				
9	September	4				
10	Oktober	3				
11	November	3				
12	Desember	3				
TOTAL		35		16		



Lombok, Bali, 18 April 2024

Pawan Cahyo Ashuri, S.Pi., M.Pi.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.2517/DJPB.1/HP.620/IV/2024 16 April 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 2 berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB" Triwulan I Tahun 2024

Yth. (daftar terlampir)

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan I Tahun 2024, bersama ini disampaikan capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB" sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 31 Maret 2024 (Triwulan IV Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satker sampai dengan 31 Maret 2024 (Triwulan I Tahun 2024).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan I Tahun 2024 lingkup DJPB sebesar 93,25% (tuntas 359 dari 385 rekomendasi).
3. Data capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing Satker disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sesditjen Perikanan Budidaya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Lampiran Surat Dinas
Nomor : B.2517/DJPB.1/HP.620/IV/2024
Tanggal : 16 April 2024

DAFTAR NAMA PEJABAT PENERIMA SURAT

1. Direktur Perbenihan
2. Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan
3. Direktur Pakan dan Obat Ikan
4. Plt. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya
5. Kepala BBPBL Lampung
6. Kepala BBPBAP Jepara
7. Kepala BPBAP Situbondo
8. Kepala BPBAP Ujung Batee
9. Kepala BPBAP Takalar
10. Kepala BPBAT Tatelu
11. Kepala BPBL Ambon
12. Kepala BPBL Batam
13. Kepala BLUPPB Karawang
14. Kepala BPIUUK Karangasem
15. Kepala BPKIL Serang
16. Plh. Kepala BBPBAT Sukabumi
17. Plt. Kepala BPBAT Sungai Gelam Jambi
18. Plt. Kepala BPBAT Mandiangin
19. Plt. Kepala BPBL Lombok

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sesditjen Perikanan Budidaya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

Lampiran Surat Dinas
Nomor : B.2517/DJPB.1/HP.620/IV/2024
Tanggal : 16 April 2024

Data Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP"
Triwulan I Tahun 2024

No	Unit Kerja	Capaian IKU
1	Setditjen Perikanan Budi Daya	100,00%
2	Direktorat Perbenihan	90,00%
3	Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	82,61%
4	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	100,00%
5	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	100,00%
6	BBPBAT Sukabumi	100,00%
7	BBPBL Lampung	88,00%
8	BBPBAP Jepara	95,12%
9	BPBAP Situbondo	83,87%
10	BPBAP Ujung Batee	94,44%
11	BPBAP Takalar	90,91%
12	BPBAT Tatelu	100,00%
13	BPBAT Sungai Gelam Jambi	80,00%
14	BPBAT Mandiangin	100,00%
15	BPBL Ambon	100,00%
16	BPBL Lombok	100,00%
17	BPBL Batam	100,00%
18	BLUPPB Karawang	100,00%
19	BPIUUK Karangasem	100,00%
20	BPKIL Serang	100,00%

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Setditjen Perikanan Budidaya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik